

**ANALISIS PENGARUH PDRB, PENDIDIKAN  
DAN PENGANGGURAN TERHADAP  
KEMISKINAN  
DI KABUPATEN / KOTA JAWA TENGAH  
TAHUN 2005 - 2008**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**RAVI DWI WIJAYANTO**  
**NIM. C2B606044**

**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2010**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ravi Dwi Wijayanto

Nomor Induk Mahasiswa : C2B606044

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan)

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PDRB,  
PENDIDIKAN dan PENGANGGURAN  
TERHADAP KEMISKINAN DI  
KABUPATEN / KOTA JAWA TENGAH  
TAHUN 2005 - 2008**

Dosen Pembimbing : Fitrie Arianti SE., M.Si

Semarang, September 2010

Dosen Pembimbing



(Fitrie Arianti SE., M.Si)  
NIP. 19781116 200312 2003

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Ravi Dwi Wijayanto

Nomor Induk Mahasiswa : C2B606044

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan)

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PDRB,  
PENDIDIKAN dan PENGANGGURAN  
TERHADAP KEMISKINAN DI  
KABUPATEN / KOTA JAWA TENGAH  
TAHUN 2005 - 2008**

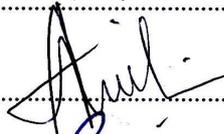
Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal **22 September 2010**

Tim Penguji :

1. Fitri Arianti SE.,M.Si

(  
.....)

2. Dra. Hj. Herniwati RH, MS

(  
.....)

3. Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP

(  
.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ravi Dwi Wijayanto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : ANALISIS PENGARUH PDRB, PENDIDIKAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH TAHUN 2005 - 2008, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang,        September 2010

Yang membuat pernyataan,



(Ravi Dwi Wijayanto)

---

NIM : C2B606044

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***Kegagalan bukanlah keberhasilan yang tertunda,***

***Kegagalan bukanlah awal menuju keberhasilan,***

***Kegagalan bukanlah pintu menuju kesuksesan,***

***Karena...***

***Kegagalan adalah kurang telitian,***

***Kegagalan adalah kurang sabaran,***

***Kegagalan adalah bukti kecerobohan kita,***

***Dan....***

***Kunci Keberhasilan adalah Jiwa yang sabar dan tahu akan Kemampuan dirinya...***

Kupersembahkan karya kecilku ini

untuk keluarga dan orang-orang terdekatku

yang selalu memberikan harapan, semangat

dan cinta dengan sepenuh hati

## **ABSTRACT**

*Poverty is a problem that involves many aspects as it relates to low income, illiteracy, low health status and the degree of inequality between the sexes and poor environment (Word Bank, 2004). Overcoming the problem of poverty can not be done separately from the problems of unemployment, education, health and other problems that are explicitly associated with the problem of poverty. Strategic issues in the government of Central Java province is not much different from the central government (national problem), namely high rates of poverty and the increasing number of unemployed. And the concern though has been in the form TKPK to address the problem of poverty that exist, but that based on BPS (Central Bureau of Statistics) in 2008, the poverty rate in Central Java is still ranked 22 out of 33 Provinces in Indonesia, and also has the largest poverty appeal in any other province in Java.*

*This study examines the influence of GDP, education (literacy), unemployment on poverty in Central Java, in this case for all of districts in Central Java in 2005 - 2008. The purpose of this research are to analyze how and how much influence the variables GDP, education (literacy), unemployment on poverty in Central Java which is expected to be used as a basis in determining the policies in addressing poverty in Central Java. Data used in this research is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) as well as browsing the internet website as a supporter. While the method of analysis used in this research is a method of linear regression analysis of panel data with FEM method with the help of software Eviews 6.*

*The results of this study indicate that the GDP variable is negative but not significant effect on poverty levels, educational variables which proxy with the literacy rate of significant negative effect on the level of poverty, unemployment variable has negative and significant impact on the level of poverty in Central Java.*

*Key words: Poverty, GDP, Education (Literacy), Unemployment*

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (*Word Bank*, 2004). Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan di pemerintahan pusat (problem nasional), yakni tingginya angka kemiskinan dan semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Dan yang memprihatinkan meskipun telah di bentuk TKPK untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang ada, tetapi bahwa berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2008, tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih menduduki peringkat ke 22 dari 33 Provinsi di Indonesia, dan juga mempunyai tingkat kemiskinan paling besar di banding Provinsi lainnya di pulau Jawa.

Studi ini meneliti tentang pengaruh PDRB, Pendidikan (melek huruf), pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, dalam hal ini untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel PDRB, Pendidikan (melek huruf), pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah sehingga nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan kebijakan dalam mengatasi masalah kemiskinan di Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta *browsing website internet* sebagai pendukung. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier panel data dengan metode *FEM* dengan bantuan *software Eviews 6*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pengangguran berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

*Kata kunci : Kemiskinan, PDRB, Pendidikan (Melek Huruf), Pengangguran*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata atau S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH PDRB, PENDIDIKAN, PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TENGAH TAHUN 2005 - 2008”, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karuniaNya, yang telah memberikan mukjizat serta kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. HM Chabachib, M.Si, Akt, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
3. Fitrié Arianti, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
4. Drs. H Edy Yusuf Agung Gunanto, MSc. Ph. D. selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis dan memberikan motivasi kepada penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Petugas Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro serta Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan bantuan berupa data dan referensi yang bermanfaat.

7. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak (Agus) dan Ibu (Sri Intarti), terima kasih atas perlindungan, kasih sayang, cinta, dan dukungan yang selalu diberikan dengan tulus kepada anak-anaknya. “Pelajaran dari perjalanan hidup kalian yang selalu memotivasi saya untuk selalu bangkit dari setiap cobaan dan keterpurukan ini.”
8. Nenekku (mbah Gini) tersayang yang tiada henti-hentinya memberikan semangat, dorongan serta doanya.
9. Kakakku, Fery Atikasari. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepadaku selama ini.
10. Adikku, Mega Aprillya. Terima kasih atas dukungan yang telah engkau berikan.
11. Fera Anggiya, pengisi hidupku 4 tahun terakhir. “Terima kasih sudah membuat hidupku lebih berwarna, tanpa dirimu pasti skripsiku lebih lama selesainya . Tapi jangan berhenti untuk tetap doakan aku biar jadi orang sukses.”
12. Mbak Ika dan mas Budi, “makasih buat makan malamnya setiap hari, maaf kalau Ravi numpang terus”
13. Seluruh teman-teman IESP Angkatan 2006 reguler II : Ami, Beki, Indra, Dedi, Hilal, Andhika A., Andhika W., Riza, Ridho, Cahyo, Pramudana, Fajar, Danang, Rea, Akrom, Rama, Dyke, Dian, Gerdy, Edit, Farid, Putra, Nasrul, Kiki, Adit. dan seluruh teman-teman IESP 2006 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Kalian semua terlalu manis untuk dilupakan. Terima kasih untuk segala bantuan, kerjasama, dan kenangan yang tlah kalian berikan.
14. Teman-teman Tim I KKN UNDIP 2010 Banyubiru khususnya tim Tegaron: Dimas, Bagus, Bram, Udin, Yanu, Acong, Novi, Phipin, Happy, Danik, Titian.
15. Tim Futsal Jalan Kartanegara.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, sehingga penulis tak lupa mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Semarang, September 2010

Penulis

Ravi Dwi Wijayanto

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINIALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>14</b>
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Kemiskinan.....	14
2.1.2 Pertumbuhan Penduduk.....	22
2.1.3 Pertumbuhan ekonomi.....	26
2.1.4 Pendidikan.....	33
2.1.5 Pengangguran.....	36
2.2 Pengaruh Variabel Independen dan Dependen.....	40

2.2.1	Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan.....	40
2.2.2	Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan.....	42
2.2.3	Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan.....	43
2.3	Penelitian Terdahulu.....	45
2.4	Kerangka Pemikiran.....	53
2.5	Hipotesis.....	54

### **BAB III METODE PENELITIAN** **56**

3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	56
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	59
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	60
3.4	Metode Analisis.....	61
3.4.1	Analisis Panel Data.....	61
3.4.2	Estimasi Model.....	64
3.5	Pengujian asumsi Klasik.....	67
3.5.1	Uji Normalitas.....	67
3.5.2	Uji Multikolinearitas.....	68
3.5.3	Uji Autokolinearitas.....	69
3.5.4	Uji Heterokedastisitas.....	70
3.6	Pengujian Kriteria Statistik.....	71
3.6.1	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t).....	71
3.6.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji-F).....	73
3.6.3	Uji Koefisien Determinasi (Uji R-squared).....	74

### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	75
4.1.1	Kondisi Geografis.....	75
4.2	Analisis Data.....	76
4.2.1	Kemiskinan.....	76
4.2.2	PDRB.....	78

4.2.3	Pendidikan.....	80
4.2.4	Pengangguran.....	82
4.3	Pengujian Asumsi Klasik.....	84
4.3.1	Uji Normalitas.....	85
4.3.2	Uji Multikolinearitas.....	86
4.3.3	Uji Autokolinearitas.....	87
4.3.4	Uji Heterokedastisitas.....	88
4.4	Pengujian Statistik Analisis Regresi.....	88
4.4.1	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t).....	88
4.4.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji-F).....	89
4.4.3	Uji Koefisien Determinasi (Uji R-squared).....	90
4.5	Interpretasi Hasil dan Pembahasan.....	91
4.5.1	Pengaruh Variabel Independen Terhadap Dependen.....	91
4.5.1.1	PDRB dan Kemiskinan.....	91
4.5.1.2	Pendidikan dan Kemiskinan.....	92
4.5.1.3	Pengangguran dan Kemiskinan.....	93

## **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan.....	95
5.2	Keterbatasan.....	96
5.3	Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Persentase Kemiskinan di enam Provinsi di Pulau Jawa.....	3
Tabel 1.2 Batas, Jumlah dan Presentase Kemiskinan di Jateng .....	4
Tabel 1.3 PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jateng 2004-2008.....	6
Tabel 1.4 Angka Melek Huruf Jateng 2004-2008.....	6
Tabel 1.5 Jumlah Pengangguran Jateng 2004-2008.....	7
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	51
Tabel 3.1 Kriteria Durbin-Watson.....	69
Tabel 4.1 Jumlah Kemiskinan menurut kab/kota di Jateng.....	77
Tabel 4.2 PDRB menurut kab/kota di Jateng.....	79
Tabel 4.3 Tingkat Melek Huruf menurut kab/kota di Jateng.....	81
Tabel 4.4 Tingkat Pengangguran menurut kab/kota di Jateng.....	83
Tabel 4.5 Ringkasan Regresi utama.....	84
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas.....	86
Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas.....	88
Tabel 4.8 Uji t.....	89

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Teori Nelson dan Leibstein.....	25
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	54
Gambar 3.1 Kurva Uji Durbin watson.....	70
Gambar 4.1 Uji Normalitas JB test.....	85
Gambar 4.2 Kurva hasil Uji Durbin watson.....	87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya, perubahan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal dapat menyebabkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan semula. Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan

jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin. (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K, 2003)

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan di pemerintahan pusat (problem nasional), yakni masih tingginya angka kemiskinan jika di bandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Kemiskinan Enam Propinsi di Pulau Jawa**  
**Tahun 2008**

No.	Provinsi	Persentase kemiskinan
1	DKI	3,62
2	Banten	7,64
3	Jawa Barat	11,96
4	Jawa Timur	16,68
5	DIY	17,23
6	Jawa Tengah	18,99

Sumber: *BPS Jateng, Data dan Informasi Kemiskinan Jateng 2008*

Bagi Provinsi Jawa Tengah, kemiskinan merupakan issue strategis dan mendapatkan prioritas utama untuk ditangani. Hal tersebut terbukti selain di dalam Renstra Jawa Tengah (Perda No. 11/2003), Pergub 19 tahun 2006 tentang Akselerasi Renstra, Keputusan Gubernur No. 412.6.05/55/2006 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan juga (TKPK) di dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Tengah tahun 2005-2025, kemiskinan merupakan salah satu dari issue strategis yang mendapat prioritas untuk penanganan pada setiap tahapan pelaksanaannya. Terkait dengan target tujuan pembangunan millenium yang harus tercapai pada tahun 2015, maka Provinsi Jawa masih harus bekerja keras untuk dapat mencapai target tersebut, mengingat upaya penanggulangan kemiskinan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2008 secara agregat terlihat cukup dinamis yaitu diatas 5 persen. Selama periode 2004 sampai dengan 2008, perekonomian Jawa Tengah menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun yaitu tumbuh berkisar 5,0 sampai 5,5 persen. Namun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tidak selalu diiringi dengan penurunan kemiskinan yang signifikan

di Jawa Tengah. Bahkan ketika indikator perekonomian Jawa Tengah naik di tahun 2006, kemiskinan di Jawa Tengah juga ikut naik mencapai 547.100 penduduk. Yang lebih memprihatinkan yaitu bahwa berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2009, kemiskinan Jawa Tengah menduduki peringkat ke 22 dari 33 Provinsi di Indonesia yaitu sebesar 18,99 persen. Dan lebih lagi bahwa jika dibandingkan kemiskinan di Pulau Jawa, Jawa Tengah mempunyai kemiskinan paling besar di banding Provinsi lainnya di pulau Jawa.

**Tabel 1.2**  
**Batas Miskin, Persentase, Jumlah Penduduk Miskin**  
**Di Jawa Tengah Tahun 2004-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (000)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	<b>Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)</b>
<b>2004</b>	<b>6.843,80</b>	<b>21,11</b>	<b>126.651</b>
<b>2005</b>	<b>6.553,50</b>	<b>20,49</b>	<b>130.013</b>
<b>2006</b>	<b>7.100,60</b>	<b>22,19</b>	<b>142.337</b>
<b>2007</b>	<b>6.557,20</b>	<b>20,43</b>	<b>154.111</b>
<b>2008</b>	<b>6.112,60</b>	<b>18,99</b>	<b>181.877</b>

*Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2008*

Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia dewasa ini. Pemerintah di negara manapun dapat segera jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program-program di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional (Todaro 2000).

Pada awal tahun 1970, para ahli ekonomi mulai meragukan manfaat pertumbuhan pendapatan nasional dalam pembangunan ekonomi sebab di banyak negara yang sedang berkembang terdapat gejala adanya kemiskinan, ketidakmerataan distribusi pendapatan, dan pengangguran yang cenderung meningkat walaupun pendapatan nasional mengalami peningkatan secara stabil. Oleh sebab itu, mulai awal tahun 1970 muncul pendapat bahwa apabila pembangunan tidak disertai pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada penduduk miskin, maka mustahil akan memberikan hasil yang optimal. Dalam periode tersebut munculah teori-teori baru seperti Teori Pertumbuhan dan Distribusi New-Keynesian oleh Kaldor (1955) dan Passinetti (1962). Secara umum, teori-teori ini menyatakan bahwa pembangunan ekonomi akan mencapai hasil yang optimal jika peningkatan pendapatan nasional disertai dengan pemerataan pendapatan bagi seluruh kelompok masyarakat (Tambunan dalam Dian Octaviani, 2001).

Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang sangat besar akan berpengaruh terhadap kondisi sosial manusia di Jawa Tengah. Permasalahan dan tantangan pembangunan daerah lima tahun ke depan masih diprioritaskan pada masalah-masalah sosial yang mendasar, antara lain besarnya angka kemiskinan dan pengangguran.

**Tabel 1.3**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000**  
**Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi**  
**Jawa Tengah Tahun 2004 – 2008**

TAHUN	PDRB Atas dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)	PERTUMBUHAN EKONOMI (Persen)
2004	135.789.872,31	5,13
2005	143.051.213,88	5,35
2006	150.682.654,74	5,33
2007	159.110.253,77	5,59
2008	167.790.369,85	5,46

*Sumber : PDRB Jawa Tengah tahun 2008*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Angka Melek Huruf Jawa Tengah Tahun 2004-2008 (Jiwa)**

No.	Tahun	Jumlah
1	2004	23.506.316
2	2005	24.283.112
3	2006	24.219.187
4	2007	26.059.930
5	2008	27.121.191

*Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2008*

Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa. Jika dunia pendidikan suatu bangsa sudah jeblok, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab, pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan

atau mengalami kebodohan bahkan secara sistematis. Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan, dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan (Winardi, 2010 dalam <http://andalasvanjavaonline.com>). Di Jawa Tengah tingkat pendidikan dapat diukur salah satunya dengan besarnya angka melek huruf. Dan berdasarkan tabel 1.5 tingkat melek huruf di Jawa Tengah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 cenderung meningkat.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Pengangguran Terbuka Di Jawa Tengah Tahun 2004-2008 (Jiwa)**

No.	Tahun	Jumlah
1	2004	1.044.573
2	2005	978.952
3	2006	1.197.244
4	2007	1.360.219
5	2008	1.227.308

*Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka tahun 2008*

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001). Di Jawa Tengah besarnya tingkat pengangguran bergerak secara naik turun. Dan di tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 132.911 jiwa.

Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses

pembangunan daerah tersebut. Menurut Esmara (dikutip dari Deni Tisna, 2008) dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan. Sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah dalam periode 2005 – 2008 karena diprovinsi ini terjadi fenomena transformasi struktur ekonomi yang meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), tetapi juga diikuti dengan peningkatan persentase kemiskinan. Hal itu terjadi di tahun 2006, dan di tahun tersebut juga mulai dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah. Dimana pembentukan TKPK tersebut dapat menanggulangi masalah kemiskinan di Jawa Tengah.

Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (*Word Bank*, 2004). Menurut Bank Dunia salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di

samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi. ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id))

Menurut Balisacan (dikutip dari penelitian Hermanto S. dan Dwi W., 2006) menyatakan bahwa Indonesia memiliki catatan yang mengesankan mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan selama dua dekade. Pertumbuhan dan kemiskinan menunjukkan hubungan yang kuat dalam tingkat agregat. Dimana panel data yang dibangun dari 285 kota/kabupaten menyatakan perbedaan yang besar pada perubahan dalam kemiskinan.

Hermanto S. dan Dwi W. (2006) dalam penelitiannya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa pertumbuhan berpengaruh negatif dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun *magnitude* pengaruh tersebut relatif tidak besar. Populasi penduduk juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan, namun besaran pengaruhnya relatif kecil. Sedangkan pendidikan mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan pengaruhnya paling besar. Hal tersebut dikarenakan pendidikan memang merupakan pionir dalam pembangunan.

Dian Oktaviani (2001) dalam analisisnya tentang bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran di Indonesia maka jumlah penduduk miskin di Indonesia juga akan semakin bertambah seiring pertambahan jumlah pengangguran. Selain itu Deni Tisna (2008) dengan penelitian yang sama juga menghasilkan hasil yang sama pula, yaitu bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Yang mana penelitiannya menggunakan metode *panel data* tahun 2003 - 2004.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu tolok ukur sosio ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya kemiskinan.

Kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun kemiskinan yang ada di Jawa Tengah hingga tahun 2008 menunjukkan jumlah penduduk miskin yang tergolong masih cukup tinggi yaitu mencapai 18,99 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum maksimalnya kebijakan pemerintah Jawa Tengah dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Padahal dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 diharapkan faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan seperti produk domestik regional

bruto (PDRB), pendidikan dan pengangguran dapat meminimalisir kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah. Oleh karena itu dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

### **1.3 Tujuan Dan Kegunaan**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.
3. Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami pengaruh jumlah penduduk, pdrb, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan sehingga dapat

dapat digunakan sebagai pilihan pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

## 2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V Kesimpulan, keterbatasan dan Saran.

#### BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan Landasan Teori, hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Teoritis, dan mencoba menarik suatu Hipotesis Penelitian.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan Analisis Deskriptif dan Objek Penelitian, Analisis Data, Pengujian Hipotesis, dan Pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Menguraikan Kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian dan saran – saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. (<http://Wikipedia.com>)

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan.

Menurut *World Bank*, dalam definisi kemiskinan adalah:

*"the denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other". (www.worldbank.org)*

Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebih menekankan pada “kualitas hidup” yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan. Sementara untuk negara-negara yang sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 1960 sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber

keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo, 2003).

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat

dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse, 1953 dalam Kuncoro, (1997) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

#### 1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

#### 2. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

### 3. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi (*consumption based poverty line*). Oleh sebab itu, menurut Kuncoro (1997) garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu:

1. pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.
2. jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Paul Spicker (2002, *Poverty and the Welfare State : Dispelling the Myths*, A Catalyst Working Paper, London: Catalyst.) penyebab kemiskinan dapat dibagi dalam empat mazhab:

1. *Individual explanation*, kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri: malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak dan sebagainya.
2. *Familial explanation*, kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor keturunan, dimana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan.
3. *Subcultural explanation*, kemiskinan yang diakibatkan oleh karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral dari masyarakat.
4. *Structural explanations*, menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan perbedaan status atau hak.

Menurut Sharp (dalam mudrajat Kuncoro, 2006) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Banyak ukuran yang menentukan angka kemiskinan, salah satunya adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan

besarnya pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui batas seseorang dikatakan miskin atau tidak, sehingga garis kemiskinan dapat digunakan untuk mengukur dan menentukan jumlah kemiskinan. Untuk provinsi Jawa Tengah, menurut laporan Badan Pusat Statistik melalui data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2008, batas garis kemiskinannya yaitu sebesar 181.877 rupiah (BPS,2008).

Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, penyebab kemiskinan (dikutip dari Deny Tisna, 2008) adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan. Penduduk miskin di daerah pedesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai.

Pemerintah telah mempersiapkan beberapa program prioritas penanggulangan kemiskinan dalam tahun 2007 didukung oleh beberapa program prioritas lain, antara lain:

1. Memberdayakan kelompok miskin yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk miskin dengan meningkatkan etos kerja, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, perbaikan konsumsi dan peningkatan gizi, serta perbaikan kemampuan dalam penguasaan IPTEK.
2. Menerapkan kebijakan ekonomi moral yaitu pengembangan sistem ekonomi moral sangat diperlukan sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi harus adil, sehingga dibutuhkan keadilan ekonomi yang bersumber pada Pancasila bukan pada ekonomi modern yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.
3. Melakukan pemetaan kemiskinan yaitu langkah awal dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu mengenali karakteristik dari penduduk yang miskin sehingga diperlukan pemetaan kemiskinan yang digunakan sebagai alat untuk memecahkan persoalan yang mereka alami.
4. Melakukan program pembangunan wilayah seperti Inpres dan transmigrasi serta memberikan pelayanan perkreditan melalui lembaga perkreditan pedesaan seperti BKD dan KCK – KUD.

### **2.1.2 Pertumbuhan Penduduk**

Menurut Maltus (dikutip dalam Lincoln Arsyad, 1997) kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas tingkat subsiten

Menurut Maier (dikutip dari Mudrajat Kuncoro, 1997) dikalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap suplai bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan.

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.
2. Banyak negara dimana penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan

antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya.

3. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarannya kota-kota di NSB membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota.

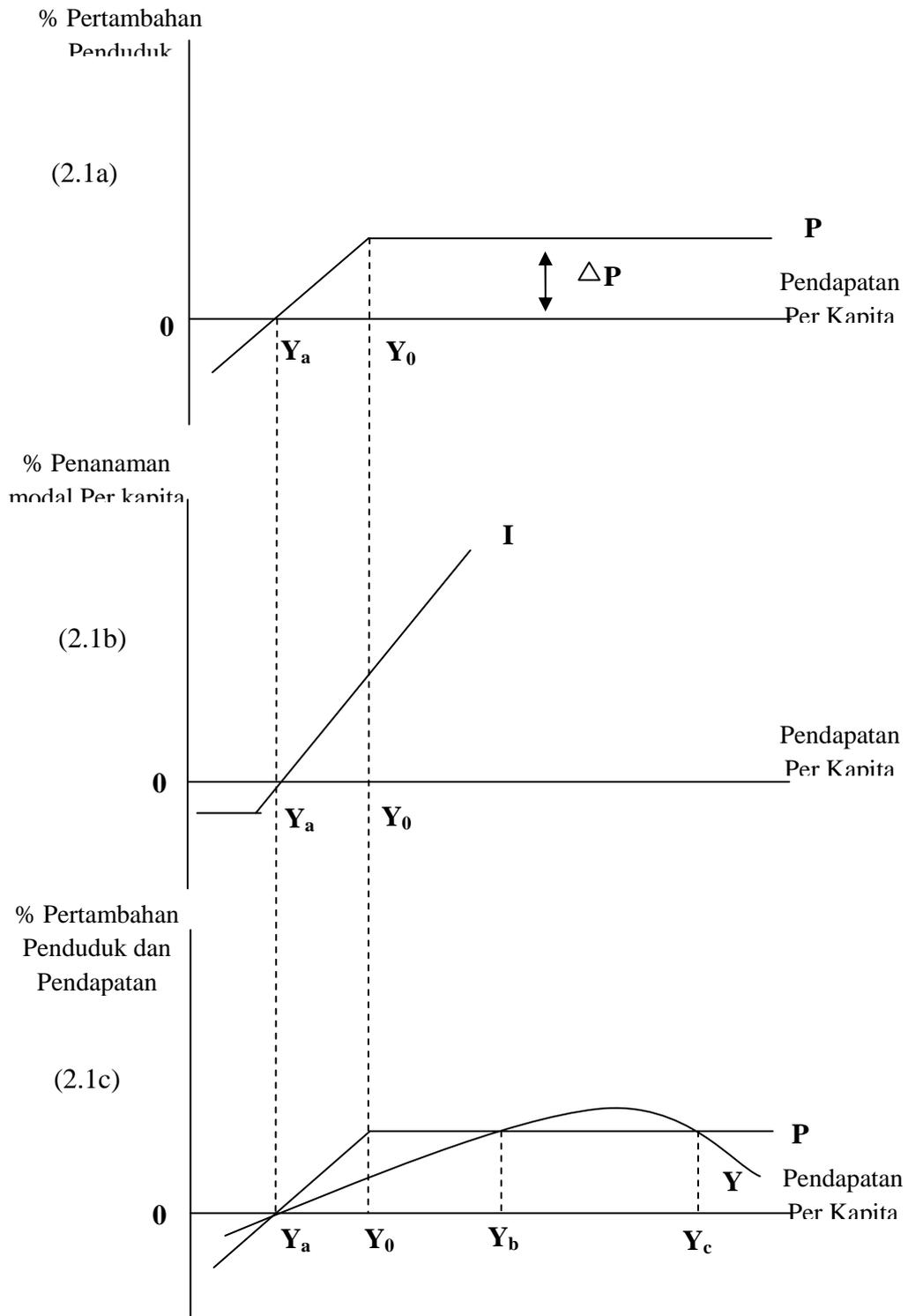
Todaro (2000) menyatakan bahwa dalam perhitungan indek kemiskinan dengan pengukuran indeks Foster Greer Thorbecke yang sering disebut juga sebagai kelas  $P_\alpha$  dari ukuran kemiskinan yaitu dirumuskan sebagai berikut:

$$P_\alpha = \frac{1}{N} \frac{\sum_{i=1}^H (Y_p - Y_i)^\alpha}{Y_p} \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana  $Y_i$  adalah pendapatan dari orang miskin yang ke- $i$ ,  $Y_p$  adalah garis kemiskinan dan  $N$  adalah jumlah penduduk. Indeks  $P_\alpha$  mempunyai bentuk yang berbeda-beda, tergantung pada nilai  $\alpha$ . Jika  $\alpha=0$ , maka pembilangnya sama dengan  $H$ , dan akan diperoleh *ratio headcount*  $H/N$ . Jika  $\alpha=1$ , maka akan diperoleh jurang kemiskinan yang dinormalisasi.

Menurut Nelson dan Leibstein (dikutip dari Sadono Sukirno, 1983) terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.

**Gambar 2.1**  
**Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kesejahteraan**  
**Menurut Nelson Dan Leibstein**



Sumber: *Sadono Sukirno, 1983*

Berdasarkan gambar (2.1) di atas bahwa sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang pesat dalam jangka panjang tingkat pendapatan perkapita akan kembali mencapai nilai yang sama dengan tingkat pendapatan cukup hidup. Gambar (2.1a) menunjukkan hubungan diantara pendapatan perkapita dan tingkat pertumbuhan penduduk, dan gambar (2.1b) menunjukkan hubungan antara pendapatan perkapita dan tingkat penanaman modal perkapita. Sedangkan gambar (2.1c) menunjukkan hubungan antara pendapatan perkapita dan tingkat pertumbuhan penduduk, selain itu juga menunjukkan hubungan pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita.

### **2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Prof. Simon Kuznets (dikutip dari Budiono,1999) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Hal tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi dicirikan dengan 3 hal pokok, antara lain:

1. laju pertumbuhan perkapita dalam arti nyata (riil).
2. persebaran atau distribusi angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkahnya.
3. pola persebaran penduduk.

Boediono (1999) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dimana penekanannya pada 3 aspek, antara lain:

1. proses, yaitu pertumbuhan ekonomi bukan merupakan suatu gambaran dari suatu perekonomian yang melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.
2. output per kapita, yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output per kapita dalam hal ini ada dua unsur yang penting seperti output total dan jumlah penduduk.
3. jangka waktu, yaitu kenaikan output per kapita selama 1 – 2 tahun lalu diikuti penurunan output per kapita bukan merupakan pertumbuhan ekonomi. Dikatakan tumbuh bila dalam jangka waktu yang lama (5 tahun atau lebih) mengalami kenaikan output per kapita.

Menurut Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001) sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut, angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Akibatnya, sasaran utama dalam pembangunan ekonomi lebih ditekankan pada usaha-usaha pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pembangunan yang dilakukan pada negara yang sedang berkembang sering mengalami dilema antara

pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

Robert Solow mengemukakan model pertumbuhan ekonomi yang disebut model pertumbuhan Solow. Model tersebut berangkat dari fungsi produksi agregat sebagai berikut:

$$Y = A \cdot F(K,L) \dots\dots\dots(2.2)$$

Dimana Y adalah output nasional (kawasan), K adalah modal (kapital) fisik, L adalah tenaga kerja dan A merupakan teknologi. Faktor yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. Y juga akan meningkat jika terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang terindikasi dari kenaikan A. Oleh karena itu pertumbuhan perekonomian nasional dapat berasal dari pertumbuhan input dan perkembangan kemajuan teknologi yang disebut juga pertumbuhan total faktor produktivitas.

Model solow dapat diperluas sehingga mencakup sumberdaya alam sebagai salah satu input. Dasar pemikirannya yaitu output nasional tidak hanya dipengaruhi K dan L tapi juga dipengaruhi oleh lahan pertanian atau sumberdaya alam lainnya seperti cadangan minyak. Perluasan model solow lainnya adalah dengan memasukkan sumberdaya manusia sebagai modal (Human Capital). Dalam literatur, teori pertumbuhan seperti ini terkategori sebagai *pertumbuhan endogen* dengan pionirnya Lucas dan Romer. Lucas menyatakan bahwa

akumulasi modal manusia, sebagaimana akumulasi modal fisik menentukan pertumbuhan ekonomi, sedangkan Romer berpandangan bahwa pertumbuhan dipengaruhi oleh tingkat modal manusia melalui pertumbuhan teknologi.

Secara sederhana dengan demikian fungsi produksi agregat dapat dimodifikasi menjadi sebagai berikut:

$$Y = A \cdot F(K, H, L) \dots\dots\dots (2.3)$$

Pada persamaan diatas, H adalah sumberdaya manusia yang merupakan akumulasi dari pendidikan dan pelatihan. Menurut Mankiw et. al. (1992) kontribusi dari setiap input pada persamaan tersebut terhadap output nasional bersifat proporsional. Suatu negara yang memberikan perhatian lebih kepada pendidikan terhadap masyarakatnya *ceteris paribus* lebih baik daripada yang tidak melakukannya. Dengan kata lain, investasi terhadap sumberdaya manusia melalui kemajuan pendidikan akan menghasilkan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apabila investasi tersebut dilaksanakan secara relatif merata, termasuk terhadap golongan berpendapatan rendah, maka kemiskinan akan berkurang. Sehingga dapat di simpulkan bahwa apabila pertumbuhan output meningkat yang dipengaruhi investasi terhadap sumberdaya manusia maka dapat menurunkan kemiskinan.

Kuncoro (2004) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari

sisi sektoral / lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 1993. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2005:56), sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi.

Untuk lebih jelas dalam menghitung angka-angka Produk Domestik Regional Bruto ada tiga pendekatan yang cukup kerap digunakan dalam melakukan suatu penelitian :

1. Menurut pendekatan Produksi

Dalam pendekatan produksi, Produk Domestik Regional Bruto adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi (Robinson Tarigan, 2005:24).

2. Menurut pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan. Metode pendekatan pendapatan banyak dipakai pada sektor jasa, tetapi tidak dibayar setara harga pasar, misalnya sektor pemerintahan. Hal ini disebabkan kurang lengkapnya data dan tidak adanya metode yang akurat yang dapat dipakai dalam mengukur nilai produksi dan biaya antara dari berbagai kegiatan jasa, terutama kegiatan yang tidak mengutip biaya (Robinson Tarigan, 2005:24).

3. Menurut pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari

segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok dan ekspor neto.

Cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu :

1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan

Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya factor produksi dalam proses produksi.

#### 2.1.4 Pendidikan

Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa. Jika dunia pendidikan suatu bangsa sudah jebol, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab, pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Sehingga, setiap bangsa yang ingin maju maka pembangunan dunia pendidikan selalu menjadi prioritas utama.

Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan atau mengalami kebodohan bahkan secara sistematis. Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan, dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan. Untuk memutus rantai sebab akibat di atas, ada satu unsur kunci yaitu pendidikan. Karena pendidikan adalah sarana menghapus kebodohan sekaligus kemiskinan. Namun ironisnya, pendidikan di Indonesia selalu terbentur oleh tiga realitas (Winardi, 2010 dalam <http://andalas.van.javaonline.com>)

- a) **Pertama**, Kepedulian pemerintah yang bisa dikatakan rendah terhadap pendidikan yang harus kalah dari urusan yang lebih strategis yaitu Politik. Bahkan, pendidikan dijadikan jargon politik untuk menuju kekuasaan agar bisa menarik simpati di mata rakyat. Jika melihat negara lain, ada kecemasan yang sangat mencolok dengan kondisi sumber daya manusia (SDM) ini. Misalnya, Amerika Serikat. Menteri Perkotaan di era Bill Clinton, Henry Cisneros, pernah mengemukakan bahwa dia khawatir tentang masa depan Amerika Serikat dengan banyaknya penduduk

keturunan Hispanik dan kulit hitam yang buta huruf dan tidak produktif. Menurut Marshal (dalam Tulus Tambunan, 1997) bahwa suatu bangsa tidak mungkin memiliki tenaga kerja bertaraf internasional jika seperempat dari pelajarnya gagal dalam menyelesaikan pendidikan menengah. Kecemasan yang sederhana, namun penuh makna, karena masyarakat Hispanik cuma satu diantara banyak etnis di Amerika Serikat. Dan di Indonesia, dapat dilihat adanya pengabaian sistematis terhadap kondisi pendidikan, bahkan ada kecenderungan untuk menganaktirikannya, dan harus kalah dari dimensi yang lain.

- b) **Kedua**, penjajahan terselubung. Di era globalisasi dan kapitalisme ini, ada sebuah penjajahan terselubung yang dilakukan negara-negara maju dari segi kapital dan politik yang telah mengadopsi berbagai dimensi kehidupan di negara-negara berkembang. Umumnya, penjajahan ini tentu tidak terlepas dari unsur ekonomi. Dengan hutang negara yang semakin meningkat, badan atau organisasi donor pun mengintervensi secara langsung maupun tidak terhadap kebijakan ekonomi suatu bangsa. Akibatnya, terjadilah privatisasi di segala bidang. Bahkan, pendidikan pun tidak luput dari usaha privatisasi ini. Dari sini pendidikan semakin mahal yang tentu tidak bisa di jangkau oleh rakyat. Akhirnya, rakyat tidak bisa lagi mengenyam pendidikan tinggi dan itu berakibat menurunnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sehingga, tidak heran jika tenaga kerja di Indonesia banyak yang berada di sektor informal akibat kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan ini salah satunya karena biaya pendidikan

yang memang mahal. Apa lagi ditengah iklim investasi global yang menuntut pemerintah memberikan kerangka hukum yang dapat melindungi Investor dan juga buruh murah. Buruh murah ini merupakan hasil dari adanya privatisasi ( otonomi kampus ),yang membuat pendidikan tidak lagi bisa dijangkau rakyat. Akhirnya, terbentuklah *link up* sistem pendidikan, dimana pendidikan hanya mampu menyediakan tenaga kuli dengan kemampuan minim.

- c) **Ketiga** adalah kondisi masyarakat sendiri yang memang tidak bisa mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan yang ada. Tentu hal ini tidak terlepas dari kondisi bangsa yang tengah dilanda krisis multidimensi sehingga harapan rakyat akan kehidupannya menjadi rendah. Bisa dikatakan, telah terjadi deprivasi relatif ( istilah Karl Marx yang di populerkan Ted R.Gurr ) dalam diri masyarakat. Hal ini akan berdampak pada kekurangannya respek terhadap dunia pendidikan, karena mereka lebih mementingkan urusan perut daripada sekolah. Akibatnya, kebodohan akan menghantui, dan kemiskinan pun akan mengiringi. Sehingga, kemiskinan menjadi sebuah reproduksi sosial, dimana dari kemiskinan akan melahirkan generasi yang tidak terdidik akibat kurangnya pendidikan, dan kemudian menjadi bodoh serta kemiskinan pun kembali menjerat.

### 2.1.5 Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Oleh sebab itu, menurut Sadono Sukirno (2000) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Menurut Edwards, 1974 (dikutip dari Lincoln,1997), bentuk-bentuk pengangguran adalah:

1. Pengangguran terbuka (*open unemployment*), adalah mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk mereka.
2. Setengah pengangguran (*under unemployment*), adalah mereka yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah sehingga

pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas produksi secara keseluruhan.

3. Tenaga kerja yang lemah (*impaired*), adalah mereka yang mungkin bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
4. Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.

Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*.
2. Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di negara yang sedang berkembang menjadi semakin serius. Tingkat pengangguran terbuka sekarang ini yang ada di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia rata-rata sekitar 10 persen dari seluruh angkatan kerja di

perkotaan. Masalah ini dipandang lebih serius lagi bagi mereka yang berusia antara 15 - 24 tahun yang kebanyakan mempunyai pendidikan yang lumayan. Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak saja dari masalah kesempatan kerja di negara yang sedang berkembang yang bagaikan ujung sebuah gunung es. Apabila mereka tidak bekerja konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, kondisi seperti ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah kemiskinan yang ada.

Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Namun demikian, adalah salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka (Lincoln Arsyad, 1997)

Di samping penjelasan tersebut, salah satu mekanisme pokok untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara

sedang berkembang adalah memberikan upah yang memadai dan menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat miskin (Lincoln Arsyad, 1997). Dian Octaviani (2001) menyatakan bahwa sebagian rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (terutama kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka insiden pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin.

Besarnya dampak krisis terhadap kemiskinan yang menyebabkan menjamurnya insiden kebangkrutan sebagai akibat tekanan pada kesempatan kerja di sektor informal perkotaan semakin besar. Hal tersebut menunjukkan ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dengan luasnya kemiskinan. Pada negara yang sedang berkembang bukan saja menghadapi kemerosotan dalam ketimpangan relatif tetapi juga masalah kenaikan dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran. Besarnya dimensi kemiskinan tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau konsumsinya berada di bawah tingkat minimum yang telah ditetapkan. Masyarakat miskin pada umumnya menghadapi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, melemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak

dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.

Oleh sebab itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah telah merumuskan berbagai rencana untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak guna mengurangi tingkat pengangguran. Rencana tersebut antara lain:

1. Meningkatkan efektifitas dan kemampuan kelembagaan pemerintah dalam menegakkan hubungan industrial yang manusiawi.
2. Meningkatkan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam rangka mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha.
4. Meningkatkan perlindungan terhadap buruh migran di dalam dan luar negeri.

## **2.2 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen**

### **2.2.1 Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan**

Menurut Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001) pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

Menurut Kuncoro (2001) pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Menurut Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Menuru Kuznet (dikutip dari Tulus Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Selanjutnya menurut penelitian Deni Tisna (2008) menyatakan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

### **2.2.2 Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan**

Todaro (1994) menyatakan bahwa selama beberapa tahun, sebagian besar penelitian dibidang ilmu ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara sedang berkembang, menitik beratkan pada keterkaitan antara pendidikan, produktifitas tenaga kerja, dan tingkat output. Hal ini tidak mengherankan karena, sasaran utama pembangunan di tahun 1950-an dan 1960-an adalah mamaksimalkan tingkat pertumbuhan output total. Akibatnya, dampak pendidikan atas distribusi pendapatan dan usaha menghilangkan kemiskinan absolut sebagian besar telah dilupakan. Selanjutnya Todaro (2000) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan mamainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Gaiha (1993) menjelaskan bahwa pendidikan berperan penting dalam kesejahteraan seseorang dengan berbagai cara yang berbeda. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan penduduk untuk memperoleh dan menggunakan informasi, memperdalam pemahaman akan perekonomian, memperluas produktifitas, dan memberi pilihan kepada penduduk apakah berperan sebagai konsumen, produsen atau warganegara. Selain itu pendidikan dan distribusi pendapatan adalah mempunyai korelasi yang positif dengan penghasilannya selama hidup seseorang. Korelasi ini dapat dilihat terutama pada seseorang yang dapat menyelesaikan sekolah tingkat lanjutan dan universitas, akan mempunyai perbedaan pendapatan 300 persen sampai dengan 800 persen, dengan tenaga kerja yang hanya menyelesaikan sebagian ataupun seluruh pendidikan tingkat sekolah

dasar. Karena tingkat penghasilan sangat dipengaruhi oleh lamanya tahun memperoleh pendidikan, jelas ketimpangan pendapatan yang besar tersebut akan semakin besar.

Menurut Simmons (dikutip dari Todaro, 1994), pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dimana digambarkan dengan seorang miskin yang mengharapkan pekerjaan baik serta penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Tetapi pendidikan tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya. Sedangkan orang miskin tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikan hingga ke tingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan dan universitas. Sehingga tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dalam penelitian Hermanto dan Dwi (2006) dihasilkan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh paling tinggi terhadap kemiskinan dibandingkan variabel pembangunan lain seperti jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat inflasi.

### **2.2.3 Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan**

Lincolind Arsyad (1997) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh

adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja diperkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin.

Dian Octaviani (2001) mengatakan bahwa sebagian rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (terutama kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka insiden pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin. Yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka akanmeningkatkan kemiskinan.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**



Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”. Tulisannya menganalisis tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis yang dilakukan adalah analisis Deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data. Model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometri sebagai berikut:

$$\text{Poverty} = \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{Populasi} + \beta_3 \text{Agrishare} + \beta_4 \text{Industriesshare} \\ + \beta_5 \text{Inflasi} + \beta_6 \text{SMP} + \beta_7 \text{SMA} + \beta_8 \text{DIPLOMA} + \beta_9 \text{Dummy} \\ \text{Krisis} + \varepsilon$$

Dimana:

Poverty = Tingkat kemiskinan

PDRB = Pendapatan PDRB

Agrishare = Pangsa sektor pertanian dalam PDRB

Industriesshare = Pangsa sektor industri dalam PDRB

Inflasi = Tingkat inflasi

SMP = jumlah lulusan setingkat SMP

SMA = jumlah lulusan setingkat SMA

DIPLOMA = jumlah lulusan setingkat Diploma

Dummy Krisis = dummy krisis ekonomi

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan PDRB mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan Jumlah Penduduk mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan Inflasi mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan Share

pertanian dan industri mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan tingkat pendidikan mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan. Dimana pengaruh tingkat pendidikan SMP lebih besar daripada pengaruh share pertanian. Sedangkan kenaikan Dummy krisis mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan.

- c) Penelitian yang dilakukan oleh Deny Tisna Amijaya (2008) dengan judul “Pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004”. Tulisannya meneliti tentang pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia, dalam hal ini untuk seluruh Provinsi di Indonesia dari tahun 2003 – 2004. Analisis yang dilakukan adalah analisis Deskriptif dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data.

Model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometri sebagai berikut:

$$MS = f (GR, PDRB, PG)$$

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + U_{it}$$

dimana:

MS = jumlah kemiskinan.

GR = variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan.

PDRB = variabel tingkat pertumbuhan ekonomi.

$PG$  = variabel tingkat pengangguran.

$i$  = *cross section*.

$t$  = *time series*.

$B0$  = konstanta.

$B1, B2, B3$  = *koefisien*.

$U$  = *error*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

- d) Penelitian yang dilakukan oleh Usman, Bonar M. Sinaga, dan Mermanto Siregar (2009) dengan judul “ Analisis Determinan Kemiskinan Sebelum Dan Sesudah Desentralisasi Fiskal”. Tulisannya menganalisis tentang Bagaimana pengaruh penerapan desentralisasi fiskal terhadap determinasi kemiskinan. Dimana Analisis tentang variabel-variabel yang berhubungan dengan kemiskinan atau determinan kemiskinan untuk menjawab tujuan dari studi ini dilakukan dengan menggunakan Model Regresi Logit atau disingkat Model Logit.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel yang dapat menambah kemiskinan berturut-turut dari nilai *marginal effect* terbesar adalah jumlah anggota rumah tangga, kepala keluarga sebagai buruh tani, sumber air yang tidak terlindung, dan kepala keluarga bekerja di bidang pertanian. Variabel yang dapat

mengurangi kemiskinan adalah kepala rumah tangga yang bekerja, kepemilikan aset lahan pertanian, dan jumlah tahun bersekolah seluruh anggota keluarga.

- e) Penelitian yang dilakukan oleh Rasidin K. Sitepul dan Bonar M. Sinaga (2009) dengan judul “ Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium”. Tulisannya menganalisis tentang Bagaimana pengaruh investasi sumberdaya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan in Indonesia dengan menggunakan kombinasi model Komputasi Keseimbangan umum dan metode *Foster-Greer-Thorbecke*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Peningkatan investasi sumberdaya manusia secara langsung berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja yang mendorong pada peningkatan Produk Domestik Bruto Riil, yang ditunjukkan oleh peningkatan stok kapital, neraca perdagangan dan konsumsi rumah tangga. Investasi sumberdaya manusia untuk pendidikan dapat menurunkan *poverty incidence*, *poverty depth* dan *poverty severity* kecuali untuk rumahtangga bukan pertanian golongan atas di desa, bukan angkatan kerja di kota dan bukan pertanian golongan atas di kota.
  
- f) Penelitian yang dilakukan oleh Harlem Siahaan (1995) dengan judul “Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Teoritik Politik Indonesia 1945 – 1984”. Tulisannya menganalisis tentang pertumbuhan ekonomi yang cepat (dipercepat) pada umumnya berpotensi menciptakan

berbagai bentuk kesenjangan dan permasalahan yang menghasilkan kontradiksi sosial-politik. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia maupun perbaikan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut, akan berpotensi menciptakan situasi dan fenomena politik yang tidak menentu karena masalah-masalah ekonomi termasuk pembangunan ekonomi tidaklah tepat jika dilihat dari sudut dan perspektif ekonomi.

TABEL 2.1

## RANGKUMAN PENELITIAN TERHADULU

No	JUDUL dan PENULIS (Tahun)	Variabel	PERMASALAHAN	HASIL PENELITIAN
1	Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke Oleh: Dian Octaviani (2001)	Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Gini Rasio	Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia	Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia.
2	Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Oleh: Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2006)	PDRB, Jumlah penduduk, Share pertanian, Share industri, Inflasi, Pendidikan, Dummy krisis ekonomi th 1997-1998	Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan,</li> <li>• Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan,</li> <li>• Tingkat Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan,</li> <li>• Share pertanian dan industri berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan,</li> <li>• Tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.</li> <li>• Krisis berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan</li> </ul>
3	Pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004 Oleh: Deny Tisna Amijaya (2008)	Distribusi pendapatan, Pertumbuhan ekonomi (PDRB), Pengangguran	Bagaimana pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan Indonesia 2003–2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidakmerataan distribusi pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan,</li> <li>• Tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan,</li> <li>• Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan</li> </ul>
4	Analisis determinan	Jumlah anggota rumah	Bagaimana pengaruh	Variabel yang dapat menambah kemiskinan

	kemiskinan sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal 5 Oleh: Usman, Bonar M. Sinaga, dan Mermanto Siregar (2009)	Tangga, Kepala rumah tangga yang bekerja, Kepemilikan aset lahan pertanian, Lama pendidikan anggota keluarga	penerapan desentralisasi fiskal terhadap determinasi kemiskinan.	berturut-turut dari nilai <i>marginal effect</i> terbesar adalah jumlah anggota rumah tangga, kepala keluarga sebagai buruh tani, sumber air yang tidak terlindung, dan kepala keluarga bekerja di bidang pertanian. Variabel yang dapat mengurangi kemiskinan adalah kepala rumah tangga yang bekerja, kepemilikan aset lahan pertanian, dan jumlah tahun bersekolah seluruh anggota keluarga
5	Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium Oleh: Rasidin K. Sitepul dan Bonar M. Sinaga (2009)	Tingkat Pendidikan Pertumbuhan ekonomi (PDRB)	Bagaimana pengaruh investasi sumberdaya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan in Indonesia dengan menggunakan kombinasi model Komputasi Keseimbangan umum dan metode <i>Foster-Greer-Thorbecke</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan investasi sumberdaya manusia secara langsung berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja yang mendorong pada peningkatan Produk Domestik Bruto Riil, yang ditunjukkan oleh peningkatan stok kapital, neraca perdagangan dan konsumsi rumah tangga.</li> <li>• Investasi sumberdaya manusia untuk pendidikan dapat menurunkan <i>poverty incidence</i>, <i>poverty depth</i> dan <i>poverty severity</i> kecuali untuk rumahtangga bukan pertanian golongan atas di desa, bukan angkatan kerja di kota dan bukan pertanian golongan atas di kota</li> </ul>
6	Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Teoritik Politik Indonesia 1945 – 1984 Oleh: Harlem Siahaan (1995)		Bagaimana hubungan pertumbuhan ekonomi yang cepat (dipercepat) terhadap berbagai bentuk kesenjangan dan permasalahan yang menghasilkan kontradiksi sosial-politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia maupun perbaikan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut, akan berpotensi menciptakan situasi dan fenomena politik yang tidak menentu karena masalah-masalah ekonomi termasuk pembangunan ekonomi tidaklah tepat jika dilihat dari sudut dan perspektif ekonomi.</li> </ul>

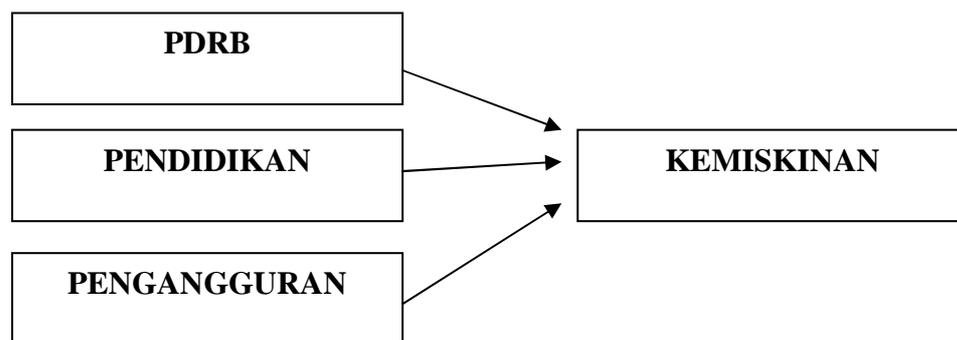
## 2.4 Kerangka Pemikiran

Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2008 masih menduduki peringkat paling tinggi dibanding provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa, padahal tujuan perencanaan pembangunan yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya penting dalam mengurangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini merupakan permasalahan mendasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Hermanto dan Dwi (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang lazim dipergunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan. Dimana pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB, pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat share pertanian dan industri, tingkat inflasi dan pendidikan. Selanjutnya Deni Tisna (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan. Sehingga penelitian ini difokuskan pada bagaimana pengaruh Jumlah penduduk, PDRB, pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh tiga variabel pembangunan ekonomi, antara lain PDRB, pendidikan dan tingkat pengangguran. Kemudian variabel-variabel tersebut sebagai variabel independen (bebas) dan bersama-sama, dengan variabel dependen (terikat) yaitu kemiskinan yang diukur dengan alat analisis regresi untuk mendapatkan tingkat signifikansinya. Dengan hasil regresi tersebut diharapkan mendapatkan tingkat signifikansi setiap variabel independen dalam

mempengaruhi kemiskinan. Selanjutnya tingkat signifikansi setiap variabel independen tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak yang terkait mengenai penyebab kemiskinan di Jawa Tengah untuk dapat merumuskan suatu kebijakan yang relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Secara skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **2.5 Hipotesis**

Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (J. Supranto, 1997)

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
2. Diduga pendidikan (melek huruf) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
3. Diduga pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional**

Variabel penelitian merupakan *construct* atau konsep yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian adalah kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah menurut kabupaten/kota pada tahun 2006-2008.

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendidikan dan pengangguran.

Langkah berikutnya setelah menspesifikasi variabel-variabel penelitian adalah melakukan pendefinisian secara operasional. Hal ini bertujuan agar variabel penelitian yang telah ditetapkan dapat dioperasionalkan, sehingga memberikan petunjuk tentang bagian suatu variabel dapat diukur.

Dalam penelitian ini definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Kemiskinan (KM)**

Kemiskinan berarti sejumlah penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang telah ditetapkan oleh suatu badan atau orang tertentu dan perhitungan yang dilakukan oleh badan atau organisasi tersebut digunakan sebagai standar perhitungan untuk menentukan jumlah kemiskinan yang ada di suatu daerah. Atau singkatnya, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah persentase penduduk miskin tahun 2005 – 2008 (dalam satuan persen).

### **2. PDRB (PDRB)**

PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi didalam suatu daerah tertentu dalam satu tahun tertentu. Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak, perhitungan PDRB akan ditimbulkan dari suatu daerah ada tiga pendekatan. PDRB yang dimaksud adalah laju PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 tahun 2005 – 2008 (dalam satuan persen).

### **3. Pendidikan (MH)**

Pendidikan dalam hal ini diproksi dengan besarnya angka melek huruf. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) melek huruf adalah kemampuan seseorang membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya (selain huruf latin) yang masing-masing merupakan keterampilan dasar yang diajarkan di kelas-kelas awal jenjang pendidikan dasar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penduduk melek huruf Jawa Tengah tahun 2005 – 2008 (dalam satuan persen).

### **4. Pengangguran (PG)**

Pengangguran berarti seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengertian pengangguran terbuka (*open unemployment*) menurut Edwards (1974) (dalam Lincoln, 1997) adalah mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk mereka. Sedangkan menurut BPS (Badan Pusat Statistik) adalah meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Data yang digunakan untuk melihat pengangguran adalah pengangguran terbuka di Jawa Tengah tahun 2005 – 2008 (dalam satuan persen).

### 3.2 Jenis Dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari deret berkala (*time series*) dari tahun 2005 - 2008 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 35 data mewakili kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menghasilkan 140 observasi. Pemilihan periode ini disebabkan karena kemiskinan mengalami fluktuasi dan terjadinya peningkatan PDRB dan diikuti dengan peningkatan pengangguran di tahun 2006, sehingga penelitian pada periode tersebut menarik untuk diamati serta data tersedia pada tahun tersebut.

Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari Badan Pusat Statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005). Periode data yang digunakan adalah data tahun 2005 - 2008 untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Data yang diperlukan adalah:

1. Data persentase penduduk miskin daerah untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 - 2008.
2. Data laju Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan untuk masing-masing kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2005-2008.

3. Data pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008.
4. Data pengangguran terbuka untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008.

Adapun sumber data tersebut diatas diperoleh dari:

1. Data persentase penduduk miskin daerah untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 - 2008, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Data dan Informasi Kemiskinan”.
2. Data laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “PDRB Jawa Tengah”.
3. Data pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Jawa Tengah Dalam Angka”.
4. Data pengangguran untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah”.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Anto Dajan (2001) Menyatakan bahwa metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data kuantitatif, disamping itu metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna

memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat diberikan pada obyek yang diteliti.

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2005 – 2008. Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, surat kabar, serta dari *browsing website internet* yang terkait dengan masalah kemiskinan.

### 3.4 Metode Analisis

#### 3.4.1 Metode Analisis Data Panel

Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 6. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time-series data*) dan kerat lintang (*cross-section data*). Gujarati (2003) menyatakan bahwa untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama di survey dalam beberapa waktu. Dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots (3.1)$$

dimana N adalah banyaknya data *cross-section*

Sedangkan persamaan model dengan *time-series* adalah :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots(3.2)$$

dimana T adalah banyaknya *data time-series*

Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(3.3)$$

$$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

dimana :

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

$N \times T$  = banyaknya data panel

Menurut Hsiao, 1986 (dikutip dari Firmansyah, 2009) keunggulan penggunaan data panel dibandingkan deret waktu dan kerat lintang adalah :

- a. Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan *degrees of freedom* (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, dimana dapat menghasilkan ekonometri yang efisien.
- b. Dengan panel data, data lebih informatif, lebih bervariasi, yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* dan *time series* saja.
- c. Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

Dalam analisis model panel data dikenal, dua macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Kedua pendekatan yang dilakukan dalam analisis panel data dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan efek tetap (*Fixed effect*)

Salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit (*cross section*) maupun antar waktu (*time-series*).

Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)*.

2. Pendekatan efek acak (*Random effect*)

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model panel data yang di dalamnya melibatkan korelasi antar error term karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen error (*error component model*) atau disebut juga model efek acak (*random effect*).

Menurut Judge ada empat pertimbangan pokok untuk memilih antara menggunakan pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*) dalam data panel :

1. Apabila jumlah *time-series* (T) besar sedangkan jumlah *cross-section* (N) kecil, maka hasil *fixed effect* dan *random effect* tidak jauh berbeda sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung yaitu *fixed effect model* (FEM).
2. Apabila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda jauh. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (*random*) maka *random effect* harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan *fixed effect*.
3. Apabila komponen *error*  $\varepsilon_i$  individual berkorelasi maka penaksir *random effect* akan bias dan penaksir *fixed effect* tidak bias.
4. Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari *random effect* dapat terpenuhi, maka *random effect* lebih efisien dibandingkan *fixed effect*.

### 3.4.2 Estimasi Model

Penelitian mengenai pengaruh variabel variabel tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB), Pendidikan (MH) dan variabel tingkat pengangguran (PG) terhadap kemiskinan (KM) menggunakan data *time-series* selama empat tahun

yang diwakili data tahunan dari 2005 - 2008 dan data *cross-section* sebanyak 35 data mewakili kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menghasilkan 140 observasi.

Gujarati (2003) menjelaskan bahwa estimasi model regresi panel data dengan pendekatan *fixed effect* tergantung pada asumsi yang digunakan pada intersep, koefisien slope, dan *error term*, dimana ada beberapa kemungkinan asumsi yaitu :

- a. Asumsi bahwa intersep dan koefisien slope adalah konstan antar waktu (*time*) dan ruang (*space*) dan *error term* mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu.
- b. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu.
- c. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu dan waktu.
- d. Seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar individu.
- e. Intersep sebagaimana koefisien slope bervariasi antar individu dan waktu.

Dalam penelitian ini, pengaruh variabel variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan (MH) dan variabel tingkat pengangguran (PG) terhadap kemiskinan (KM) digunakan asumsi *FEM* dikarenakan N besar dan T kecil selain itu bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan *fixed effect*. Asumsi *FEM* yang digunakan dalam penelitian ini adalah asumsi *FEM* yang kedua, yaitu koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu.

Model fungsi yang akan digunakan untuk mengetahui kemiskinan di Jawa Tengah yaitu:

$$KM = f(PDRB, MH, PG) \dots\dots\dots (3.4)$$

$$KM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 MH_{it} + \beta_3 PG_{it} + U_{it} \dots\dots\dots (3.5)$$

dimana:

KM	=	persentase kemiskinan dalam persen.
PDRB	=	laju PDRB harga konstan 2000 dalam persen.
MH	=	pendidikan atau angka melek huruf dalam persen
PG	=	pengangguran dalam persen.
<i>i</i>	=	<i>cross section</i> .
<i>t</i>	=	<i>time series</i> .
<i>B0</i>	=	konstanta.
<i>B1, B2, B3</i>	=	<i>koefisien</i> .
<i>U</i>	=	<i>error</i> .

Adanya perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma natural. Alasan pemilihan model logaritma natural (Imam Ghozali, 2005) adalah sebagai berikut :

- Menghindari adanya heteroskedastisitas
- Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas
- Mendekatkan skala data

Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah dalam bentuk log - linear (*log*). Sehingga persamaan menjadi sebagai berikut:

$$\text{Log KM} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log PDRB}_{it} + \beta_2 \text{Log MH}_{it} + \beta_3 \text{Log PG}_{it} + U_{it} \dots\dots\dots (3.6)$$

keterangan:

log	=	log-linear.
$\beta_1 - \beta_5$	=	koefisien.

$$U = error.$$

### 3.5 Pengujian Asumsi Klasik

#### 3.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Imam Ghazali, 2002). Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidak gangguan ( $\mu$ ) antara lain J-B test dan metode grafik. Penelitian ini akan menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan menghitung skweness dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai  $X^2$  (Chi Square) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal. Model untuk mengetahui uji normalitas adalah:

$$J - B \text{ hitung} = \left[ S^2/6 + \left( \frac{k-3}{24} \right)^2 \right] \dots\dots\dots (3.7)$$

dimana:

S = Skewness statistik

K = Kurtosis

Jika nilai J – B hitung > J-B tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual  $U_t$  terdistribusi normal ditolak dan sebaliknya.

### 3.5.2 Uji Multikolinearitas

Imam Ghozali (2002) menyatakan bahwa multikolinearitas mempunyai pengertian bahwa ada hubungan linear yang “sempurna” atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independen (variabel yang menjelaskan) dari model regresi. Konsekuensi adanya multikolinearitas adalah koefisien regresi variabel tidak tentu dan kesalahan menjadi tidak terhingga. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu munculnya multikolinearitas adalah  $R^2$  sangat tinggi dan tidak satupun koefisien regresi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebas secara skolastik. Model untuk mengetahui uji multikolinearitas adalah:

$$KM = f(PDRB, MH, PG) \dots\dots\dots (3.8)$$

$$PDRB = f(MH, PG) \dots\dots\dots (3.9)$$

$$MH = f(PDRB, PG) \dots\dots\dots (3.10)$$

$$PG = f(PDRB, MH) \dots\dots\dots (3.11)$$

Penelitian ini akan menggunakan *Auxiliary Regression* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika  $R^2$  regresi persamaan utama

lebih besar dari  $R^2$  regresi *auxiliary* maka di dalam model tidak terdapat multikolinearitas.

### 3.5.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross-sectional*). Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang (sebelumnya). Pengujian menggunakan uji Durbin Watson untuk melihat gejala autokorelasi.

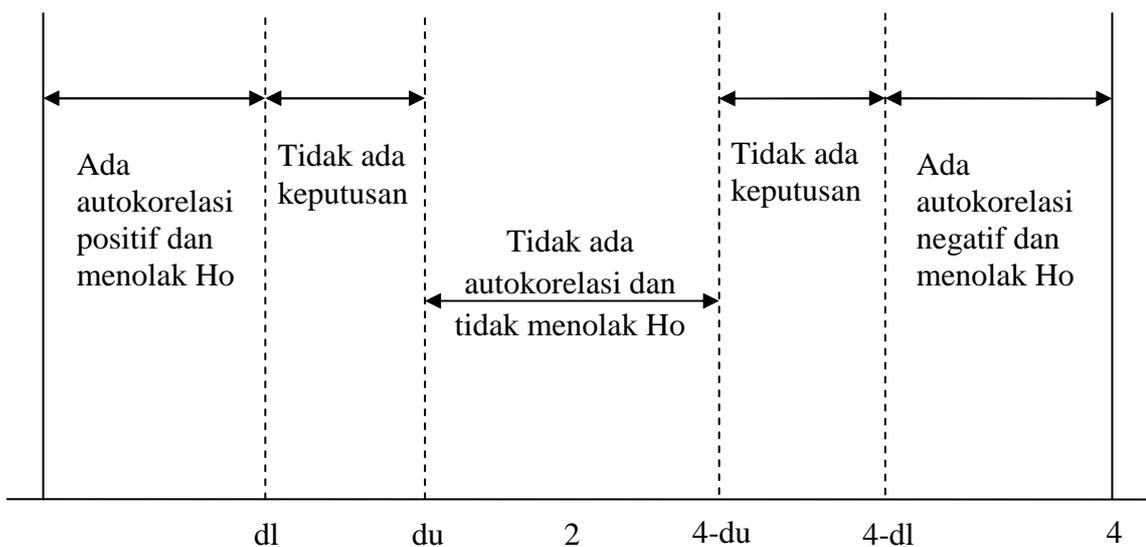
**Tabel 3.1**  
**Kriteria Pengujian Durbin Watson**

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada atokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl < d < du$
Ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-du < d < 4-dl$
Tidak ada autokorelasi	Jangan tolak	$du < d < 4-du$

Sumber: *Imam Gozali, 2002*

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 3.1**  
**Aturan Membandingkan Uji Durbin-Watson Dengan Tabel Durbin-Watson**



Sumber: Imam Gozali, 2002

### 3.5.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti bahwa variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi yaitu homoskedastisitas yaitu variasi residual sama untuk semua pengamatan. Secara ringkas walaupun terdapat heteroskedastisitas maka penaksir OLS (*Ordinary Least Square*) tetap tidak bias dan konsisten tetapi penaksir tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (yaitu *asimtotik*). Menurut Gujarati (1995) bahwa masalah heteroskedastisitas nampaknya menjadi lebih biasa dalam data *cross section* dibandingkan dengan data *time series*.

Penelitian ini menggunakan uji *Park* untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Uji *Park* pada prinsipnya meregres residual yang dikuadratkan dengan variabel bebas pada model. Jika  $t$ -statistik  $>$   $t$ -tabel maka ada heterokedastisitas, jika  $t$ -statistik  $<$   $t$ -tabel maka tidak ada heterokedastisitas. atau Jika nilai Prob  $>$  0,05 maka tidak ada heterokedastisitas, jika nilai Prob  $<$  0,05 maka ada heterokedastisitas.

### 3.6 Pengujian Kriteria Statistik

Gujarati (1995) menyatakan bahwa uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah  $H_0$  dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada.

Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji  $t$ ), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (uji  $F$ ), dan pengujian koefisien determinasi (uji- $R^2$ ).

#### 3.6.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji $t$ )

Uji signifikansi parameter individual (uji  $t$ ) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Hipotesis yang digunakan:

1.  $H_0 : b_1 = 0$       tidak ada pengaruh antara variabel PDRB dengan kemiskinan.

- H1 :  $b_1 < 0$       ada pengaruh negatif antara variabel PDRB dengan kemiskinan.
2. H0 :  $b_2 = 0$       tidak ada pengaruh antara variabel melek huruf dengan kemiskinan.
- H1 :  $b_2 < 0$       ada pengaruh negatif antara variabel melek huruf dengan kemiskinan.
3. H0 :  $b_3 = 0$       tidak ada pengaruh antara variabel tingkat pengangguran dengan kemiskinan.
- H1 :  $b_3 > 0$       ada pengaruh positif antara variabel tingkat pengangguran dengan kemiskinan.

Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus:

$$t = \frac{Bi - Bi^*}{SE(Bi)} \dots\dots\dots (3.12)$$

dimana:

$\beta_i$       = parameter yang diestimasi

$\beta_i^*$       = nilai hipotesis dari  $\beta_i$  ( $H_0 : \beta_i = \beta_i^*$ )

$SE(\beta_i)$  = simpangan baku  $\beta_i$

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b) Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  diterima, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

### 3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan:

1.  $H_0 : b_1, b_2, b_3 = 0$                       semua variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama
2.  $H_1 : b_1, b_2, b_3 \neq 0$                     semua variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama

Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{1 - R^2 / (N - 1)} \dots\dots\dots (3.13)$$

dimana:

k = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = jumlah observasi

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

- a)  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak apabila  $F$  hitung  $<$   $F$  tabel, yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
- b)  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima apabila  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel, yang artinya variabel penjelas secara bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

### 3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (uji $R^2$ )

Imam Ghozali (2002) menyatakan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai ( $R^2$ ) adalah antara nol dan satu. Nilai ( $R^2$ ) yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* ( $R^2$ ) pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan formula:

$$R^2 = \frac{\sum y^{*2}}{\sum y^2} \dots\dots\dots (3.14)$$

dimana:

$y^*$  = nilai  $y$  estimasi

$y$  = nilai  $y$  aktual

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS**

#### **4.1 Deskripsi Obyek Penelitian**

##### **4.1.1 Kondisi Geografis**

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa letaknya diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara geografis letaknya antara  $5^{\circ}40'$  dan  $8^{\circ}30'$  Lintang Selatan dan antara  $108^{\circ}30'$  dan  $110^{\circ}30'$  Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 km dan dari utara ke selatan adalah 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).

Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3.254.412 hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dan 1,70 persen dari luas Indonesia. Luas wilayah tersebut terdiri dari 991 ribu hektar (30,45 persen) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,55 persen) bukan lahan sawah.

Provinsi Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan di Kota Semarang, secara administratif terbagi dalam 35 kabupaten/kota (29 kabupaten dan 6 kota) dengan 565 kecamatan yang meliputi 7872 desa dan 622 kelurahan. Secara administratif Provinsi Jawa Tengah berbatasan oleh :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Jawa Timur

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Jawa Barat

75

## **4.2 Analisis Data**

### **4.2.1 Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup (*Word Bank*, 2004). Selain itu kemiskinan juga merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Oleh karena itu, pemerintah sangat berupaya keras untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut sehingga pembangunan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam menentukan batas ukur untuk mengenali siapa si miskin tersebut. Berikut disajikan data tentang kemiskinan yang terjadi menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005-2008.

**Tabel 4.1**  
**Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008 (dalam satuan persen)**

No.	Kab./Kota	2005	2006	2007	2008
1	Kab. Banjarnegara	27.35	29.4	27.18	23.34
2	Kab. Banyumas	22.02	24.44	22.46	22.93
3	Kab. Batang	18.15	19.99	20.79	18.08
4	Kab. Blora	21.73	23.95	21.46	18.79
5	Kab. Boyolali	17.75	20	18.06	17.08
6	Kab. Brebes	27.79	30.36	27.93	25.98
7	Kab. Cilacap	22.25	24.93	22.59	21.4
8	Kab. Demak	23.60	26.03	23.5	21.24
9	Kab. Grobogan	28	27.6	25.14	19.84
10	Kab. Japara	10.39	11.75	10.44	11.05
11	Kab. Karanganyar	16.14	18.69	17.39	15.68
12	Kab. Kebumen	29.83	32.49	30.25	27.87
13	Kab. Kendal	20.06	21.59	20.7	17.87
14	Kab. Klaten	22.48	22.99	22.27	21.72
15	Kab. Kudus	10.93	12.05	10.73	12.58
16	Kab. Magelang	15.42	17.36	17.37	16.49
17	Kab. Pati	19.82	22.14	19.79	17.9
18	Kab. Pekalongan	20.47	22.8	20.31	19.52
19	Kab. Pemasang	22.59	25.3	22.79	23.92
20	Kab. Purbalingga	29.95	32.38	30.24	27.12
21	Kab. Purworejo	22.77	22.75	20.49	18.22
22	Kab. Rembang	30.72	33.2	30.71	27.21
23	Kab. Semarang	13.16	13.62	12.34	11.37
24	Kab. Sragen	24.28	23.72	21.24	20.83
25	Kab. Sukoharjo	13.67	15.63	14.02	12.13
26	Kab. Tegal	19.60	20.71	18.5	15.78
27	Kab. Temanggung	14.50	16.62	16.55	16.39
28	Kab. Wonogiri	25.21	27.01	24.44	20.71
29	Kab. Wonosobo	31.68	34.43	32.29	27.72
30	Kota. Magelang	12.94	11.19	10.01	11.16
31	Kota. Pekalongan	6.37	7.38	6.62	10.29
32	Kota. Salatiga	8.81	8.9	9.01	8.47
33	Kota. Semarang	4.22	5.33	5.26	6
34	Kota. Surakarta	13.34	15.21	13.64	16.13
35	Kota. Tegal	8.96	10.4	9.36	11.28

*Sumber: Data dan informasi Kemiskinan Jateng 2008*

Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin provinsi Jawa Tengah tahun 2005 - 2008 terbanyak yaitu berada di Kabupaten Brebes yaitu sebanyak 27,79 persen di tahun 2005 dan mengalami penurunan hingga 25,98 persen di tahun 2008. Dan kabupaten/Kota yang memiliki persentase penduduk miskin paling sedikit yaitu di Kota Semarang yaitu sebanyak 6 persen di tahun 2008.

#### **4.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Menurut BPS (2008), Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan nilai output bersih (barang dan jasa akhir) yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi, di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud mulai kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa-jasa. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan potensi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Berikut disajikan data PDRB yang terjadi menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005-2008.

**Tabel 4.2**  
**Laju PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota di**  
**Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008 (dalam satuan persen)**

No.	Kab./Kota	2005	2006	2007	2008
1	Kab. Banjarnegara	3.95	4.35	5.01	4.98
2	Kab. Banyumas	3.21	4.48	5.3	5.41
3	Kab. Batang	2.8	2.51	3.49	3.67
4	Kab. Blora	4.07	3.85	3.95	5.62
5	Kab. Boyolali	4.07	4.19	4.08	4.04
6	Kab. Brebes	4.8	4.71	4.79	4.81
7	Kab. Cilacap	7.72	5	2.64	4.92
8	Kab. Demak	3.86	4.02	4.15	4.11
9	Kab. Grobogan	4.74	4	4.37	5.33
10	Kab. Japara	4.23	4.19	4.74	4.49
11	Kab. Karanganyar	5.49	5.08	5.74	5.75
12	Kab. Kebumen	3.2	4.08	4.52	5.61
13	Kab. Kendal	2.63	3.67	4.28	3.92
14	Kab. Klaten	4.59	2.3	3.31	3.39
15	Kab. Kudus	4.43	2.46	3.23	3.71
16	Kab. Magelang	4.62	4.91	5.21	4.99
17	Kab. Pati	3.94	4.45	5.19	4.94
18	Kab. Pekalongan	3.98	4.21	4.59	4.78
19	Kab. Pemalang	4.05	3.72	4.47	4.99
20	Kab. Purbalingga	4.18	5.06	6.19	5.30
21	Kab. Purworejo	4.85	5.23	6.08	5.62
22	Kab. Rembang	3.56	5.53	3.81	4.67
23	Kab. Semarang	3.11	3.81	4.72	4.26
24	Kab. Sragen	5.16	5.18	5.73	5.69
25	Kab. Sukoharjo	4.11	4.53	5.11	4.84
26	Kab. Tegal	4.72	5.19	5.51	5.32
27	Kab. Temanggung	3.99	3.31	4.03	3.54
28	Kab. Wonogiri	4.31	4.07	5.07	4.27
29	Kab. Wonosobo	3.19	3.23	3.58	3.69
30	Kota. Magelang	4.33	2.44	5.17	5.05
31	Kota. Pekalongan	3.82	3.06	3.8	3.73
32	Kota. Salatiga	4.15	4.17	5.39	4.98
33	Kota. Semarang	5.14	5.71	5.98	5.59

34	Kota. Surakarta	5.15	5.43	5.82	5.69
35	Kota. Tegal	4.87	5.15	5.21	5.15

*Sumber: PDRB Jawa Tengah 2005-2008*

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa laju PDRB yang terjadi di kabupaten / kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2005 – 2008 menunjukkan angka yang fluktuatif dari masing-saing kabupaten / kota. Laju PDRB dapat menunjukan kondisi perekonomian di masing-masing kabupaten / kota di Jawa Tengah. Dilihat dari besarnya PDRB menunjukan terjadi kesenjangan ekonomi yang relatif besar antara daerah maju dan tertinggal.

#### **4.2.3 Pendidikan (Melek Huruf)**

Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa. Sebab, pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jatidiri manusia suatu bangsa. Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan atau mengalami kebodohan bahkan secara sistematis. Sehingga, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan, dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan. Untuk memutus rantai sebab akibat diatas, ada satu unsur kunci yaitu pendidikan. Karena pendidikan adalah sarana menghapus kebodohan sekaligus kemiskinan. Salah satu indikator pendidikan adalah tingkat angka melek huruf di suatu daerah. Berikut disajikan data melek huruf menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005-2008.

**Tabel 4.3**  
**Tingkat Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota**  
**Di Jawa Tengah Tahun 2008 (dalam satuan persen)**

<b>No.</b>	<b>Kab./Kota</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
1	Kab. Banjarnegara	85	88.24	88.24	94.87
2	Kab. Banyumas	93.30	93.31	93.31	88.2
3	Kab. Batang	85.10	87.01	87.01	93.9
4	Kab. Blora	82.30	82.36	82.36	87.6
5	Kab. Boyolali	84.50	85.13	85.96	83
6	Kab. Brebes	80.10	84.3	84.85	86
7	Kab. Cilacap	90	90.1	90.1	84.9
8	Kab. Demak	89.30	90.3	90.82	90.1
9	Kab. Grobogan	86.80	90.18	90.18	90.8
10	Kab. Japara	87.20	87.91	92.62	90.2
11	Kab. Karanganyar	81.50	81.96	84.15	92.9
12	Kab. Kebumen	89.40	90.39	90.39	84.8
13	Kab. Kendal	88.40	88.58	88.93	90.4
14	Kab. Klaten	85.50	86.86	89.28	88.9
15	Kab. Kudus	89.50	91.85	91.85	89.3
16	Kab. Magelang	90.50	91.34	91.34	92
17	Kab. Pati	84.30	86.28	86.28	91.3
18	Kab. Pekalongan	86.40	89.39	89.39	86.3
19	Kab. Pemasang	85.50	87.16	87.34	89.9
20	Kab. Purbalingga	93	93.01	93.01	87.3
21	Kab. Purworejo	86.90	88.87	88.87	93
22	Kab. Rembang	88.20	88.18	88.18	89.2
23	Kab. Semarang	91.60	91.67	93.51	88.8
24	Kab. Sragen	73	76.35	81.05	93.5
25	Kab. Sukoharjo	87.20	87.2	89.75	81.2
26	Kab. Tegal	86.40	86.4	88.46	90.4
27	Kab. Temanggung	93.20	95.93	95.93	89.1
28	Kab. Wonogiri	79.10	82.03	82.03	95.9
29	Kab. Wonosobo	85.60	88.91	88.91	82
30	Kota. Magelang	94.50	97.08	97.17	88.9
31	Kota. Pekalongan	94.70	95.37	95.37	97.2
32	Kota. Salatiga	95.20	95.21	96.49	95.4
33	Kota. Semarang	95.10	95.85	95.94	96.5
34	Kota. Surakarta	95.80	96.58	96.58	95.9
35	Kota. Tegal	91.40	94.87	88.24	96.7

*Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2005 – 2008*

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa tingkat Melek huruf di provinsi Jawa Tengah tahun 2005 - 2008 terbesar yaitu berada kota Pekalongan yaitu sebesar 97,2 persen di tahun 2008 dan yang paling sedikit yaitu di Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 82 persen.

#### **4.2.4 Pengangguran**

Pengangguran adalah meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbukan (TPT) adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja (BPS, 2008). Tingkat pengangguran sangat erat hubungannya dengan laju pertumbuhan penduduk. Dengan laju pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja) yang kemudian besarnya angkatan kerja ini dapat menekan ketersediaan lapangan kerja di pasar kerja. Sedangkan angkatan kerja sendiri terdiri dari dua komponen yaitu orang yang menganggur dan orang yang bekerja. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan hanya menunjukkan aspek-aspek yang tampak saja dari masalah kesempatan kerja di negara yang sedang berkembang yang bagaikan ujung sebuah gunung es. Apabila mereka tidak bekerja konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, kondisi seperti ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya

jumlah kemiskinan yang ada. Berikut disajikan data tentang pengangguran yang terjadi menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 – 2008.

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota**  
**Di Jawa Tengah Tahun 2008 (dalam satuan persen)**

No.	Kab./Kota	2005	2006	2007	2008
1	Kab. Banjarnegara	9.61	6.82	6.39	4.91
2	Kab. Banyumas	10.72	8.36	8.07	8.05
3	Kab. Batang	11.80	9.33	8.13	8.77
4	Kab. Blora	4.60	3.94	3.92	5.71
5	Kab. Boyolali	7.94	4.27	7.25	5.9
6	Kab. Brebes	12.23	11.53	9.01	7.92
7	Kab. Cilacap	17.76	10.27	11.48	10.16
8	Kab. Demak	9.77	6.66	7.04	6.64
9	Kab. Grobogan	6.49	5.30	5.83	6.19
10	Kab. Japara	8.16	3.10	5.78	5.76
11	Kab. Karanganyar	6.69	5.79	6.63	5.7
12	Kab. Kebumen	13.17	9.61	7.18	6.12
13	Kab. Kendal	7.15	8.05	5.42	6.39
14	Kab. Klaten	7.73	8.14	8.19	7.26
15	Kab. Kudus	7.76	5.14	7.03	6.15
16	Kab. Magelang	9.62	6.15	6.26	5.06
17	Kab. Pati	7.49	8.50	8.38	9.36
18	Kab. Pekalongan	8.24	7.31	7.93	7.38
19	Kab. Pemasang	10.19	11.44	8.53	9.97
20	Kab. Purbalingga	9.47	4.45	7.56	7.08
21	Kab. Purworejo	6.59	4.19	5.43	4.32
22	Kab. Rembang	9.40	7.59	5.7	5.89
23	Kab. Semarang	6.08	5.61	9.36	7.39
24	Kab. Sragen	10.95	4.31	6.21	5.64
25	Kab. Sukoharjo	10.39	8.01	9.45	8.12
26	Kab. Tegal	11.50	9.14	9.39	9.56
27	Kab. Temanggung	6.08	4.46	6.77	4.9
28	Kab. Wonogiri	9.53	5.07	5.2	5.73
29	Kab. Wonosobo	5.78	3.11	5.68	5.5
30	Kota. Magelang	17.81	9.16	12.37	12.28
31	Kota. Pekalongan	16.03	10.57	9.64	9.75
32	Kota. Salatiga	14.93	13.20	11.35	11.27
33	Kota. Semarang	12.14	9.80	11.39	11.51
34	Kota. Surakarta	10.48	9.32	9.31	9.57
35	Kota. Tegal	14.55	8.60	14.75	13.32

*Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Prop. Jateng 2005 - 2008*

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di provinsi Jawa Tengah tahun 2005 - 2008 terbesar yaitu berada kota magelang yaitu sebanyak 17,81 persen ditahun 2005, tetapi di tahun 2008 yang paling besar yaitu di kota Tegal sebesar13,32 persen. Dan yang paling sedikit yaitu di Kabupaten Blora yaitu sebesar 4,60 persen di tahun 2005, sedangkan di tahun 2008 yang paling sedikit yaitu kabupaten Purworejo sebesar 4,32 persen.

### 4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik perlu dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Regresi Utama Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2005-2008**

	<b>Coefficient</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob.</b>
<b>C</b>	8,867	3,416	0,000
<b>LOG(PDRB)</b>	-0,076	-1,406	0,162
<b>LOG(MH)</b>	-1,267	-2,209	0,029
<b>LOG(PG)</b>	-0,089	-2,017	0,046
<b>R-squared</b>	0,968		
<b>F-Statistic</b>	83,77		
<b>Prob(F-Statistic)</b>	0.0000		
<b>Durbin-Watson</b>	1,99		

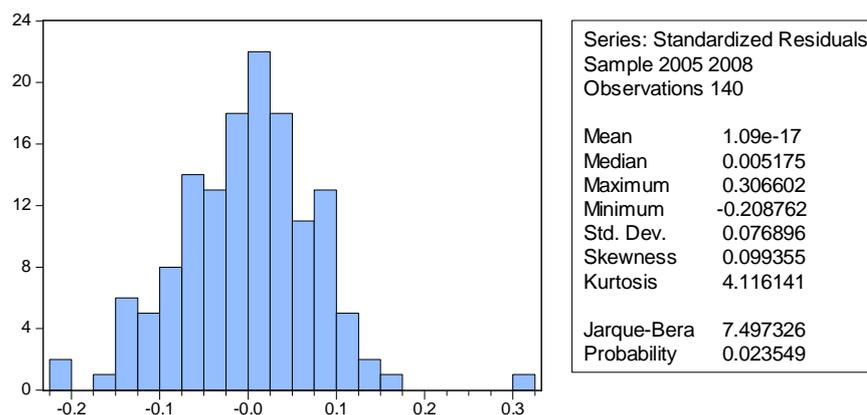
Sumber: Lampiran B

### 4.3.1 Uji Normalitas

Salah satu asumsi dalam model regresi linier adalah distribusi probabilitas gangguan  $\mu_i$  memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varians yang konstan. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Imam Ghozali, 2002).

Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak, dilakukan Uji Jarque-Bera. Hasil Uji J-B *Test* dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.

**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Jarque-Bera Pengaruh Pdrb, Pendidikan Dan Pengangguran**  
**Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah**  
**Tahun 2005 – 2008**



Pada model persamaan pengaruh jumlah penduduk, PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008 dengan  $n = 140$  dan  $k = 3$ , maka diperoleh *degree of freedom* ( $df$ ) = 135 ( $n-k$ ), dan

menggunakan  $\alpha = 5$  persen diperoleh nilai  $\chi^2$  tabel sebesar 124,34. Dibandingkan dengan nilai Jarque Bera pada Gambar 4.1 sebesar 7,497, dapat ditarik kesimpulan bahwa probabilitas gangguan  $\mu_1$  regresi tersebut terdistribusi secara normal karena nilai Jarque Bera lebih kecil dibanding nilai  $\chi^2$  tabel.

#### 4.3.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan keadaan dimana terdapat hubungan linear atau terdapat korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dilihat dari perbandingan antara nilai  $R^2$  regresi parsial (*auxiliary regression*) dengan nilai  $R^2$  regresi utama. Apabila nilai  $R^2$  regresi parsial (*auxiliary regression*) lebih besar dibandingkan nilai  $R^2$  regresi utama, maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan tersebut terjadi multikolinearitas. Tabel 4.6 menunjukkan perbandingan antara nilai  $R^2$  regresi parsial (*auxiliary regression*) dengan nilai  $R^2$  regresi utama.

**Tabel 4.6**  
 **$R^2$  Auxiliary Regression Pengaruh Pdrb, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008**

No.	Persamaan	$R^{2*}$	$R^2$
1.	PDRB MH PG	0,014	0,968
2.	MH PDRB PG	0,100	0,968
3.	PG PDRB MH	0,112	0,968

Sumber : Lampiran C

$R^2$  =  $R^2$  hasil regresi utama

$R^{2*}$  =  $R^2$  hasil *auxiliary regression*

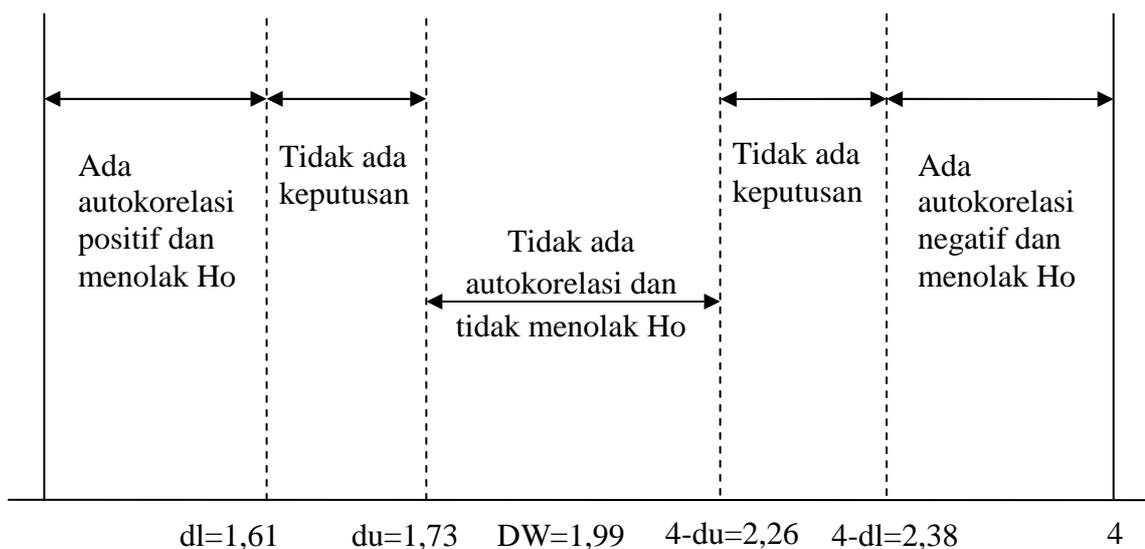
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa model persamaan pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005 -

2008 tidak mengandung multikolinieritas karena tidak ada nilai  $R^2$  regresi parsial (*auxiliary regression*) yang lebih besar dibandingkan nilai  $R^2$  regresi utama.

### 4.3.3 Uji Autokorelasi

Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson*. Uji ini sesungguhnya dilandasi oleh model *error* yang mempunyai korelasi sebagaimana telah ditunjukkan di bawah ini:

**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Durbin-Watson**



Hasil dari Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai d-hitung atau DW sebesar 1,99. Hasil dari Durbin-Watson *statistik* adalah  $du=1,73$  dan  $dl=1,61$ . Sehingga d-hitung atau DW terletak pada  $du < d < 4-du$  atau  $1,73 < 1,99 < 2,26$ . Kesimpulan yang dapat ditarik adalah tidak adanya autokorelasi didalam model.

#### 4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Artinya, setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda akibat perubahan dalam kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model (Imam Ghozali, 2005).

Dalam penelitian ini digunakan uji Park untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas yang dapat dilihat pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Park**

Dependent LOG_RESID^2				
	<b>Coefficient</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob.</b>
C	-7,202	3,472	-2,074	0,039
PDRB	0,226	0,193	1,169	0,244
MH	0,030	0,038	0,788	0,437
PG	0,030	0,063	0,476	0,634

Sumber: Lampiran C

Dari hasil perhitungan dengan uji Park terlihat bahwa tidak ada variabel independent yang signifikan secara statistik (probability >  $\alpha=5\%$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model.

#### 4.4 Pengujian Statistik Analisis Regresi

##### 4.4.1 Uji Signifikansi parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam regresi pengaruh jumlah penduduk, PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008, dengan  $\alpha$

= 5 persen dan *degree of freedom* (df) = 135 (n-k =140-5), maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,657 dan dengan  $\alpha = 10$  persen diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,288.

**Tabel 4.8**  
**Nilai T-Statistik Pengaruh Jumlah Penduduk, Pdrb, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2005 - 2008**

Variabel	t-statistik	t-tabel ( $\alpha = 5\%$ )	t-tabel ( $\alpha = 10\%$ )
LOG PDRB(PDRB)	1,406	1,657	1,288
LOG MH (Melek Huruf)	2,209	1,657	1,288
LOG PG (Pengangguran)	2,017	1,657	1,288

Sumber : Lampiran B

#### 4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Dari regresi pengaruh jumlah penduduk, PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008 yang menggunakan taraf keyakinan 95 persen ( $\alpha = 5$  persen), dengan *degree of freedom for numerator* (dfn) = 2 (k-1 = 3-1) dan *degree of freedom for denominator* (dfd) = 135 (n-k = 140-5), maka diperoleh F-tabel sebesar 3,07. Dari hasil regresi pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008 diperoleh F-statistik sebesar 83,77 dan nilai probabilitas F-statistik 0,00000. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ).

#### **4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Dari hasil regresi pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008 pada Tabel 4.9 diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,968. Hal ini berarti sebesar 96,8 persen variasi kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi tiga variabel independennya yakni PDRB (PDRB), MH (Melek huruf/Pendidikan), PG (Pengangguran). Sedangkan sisanya sebesar 3,2 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## 4.5 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

### 4.5.1 Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008

Dalam regresi pengaruh jumlah penduduk, PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008, dengan menggunakan metode *FEM*, diperoleh nilai koefisien regresi untuk setiap variabel dalam penelitian dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{LOG(KM)} = 8,867 - 0.076*\text{LOG(PDRB)} - 1,267*\text{LOG(MH)} - 0.089*\text{LOG(PG)} \dots\dots\dots (4.1)$$

Interpretasi hasil regresi pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2005 – 2008 adalah sebagai berikut:

#### 4.5.1.1 PDRB dan Kemiskinan

Variabel PDRB menunjukkan tanda negatif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil tersebut tidak sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Yang mana menurut Kuznet dalam Tulus Tambunan (2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Selanjutnya menurut Hermanto S. dan Dwi W. (2006) mengungkapkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan jumlah

penduduk miskin. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat maka kemiskinan di suatu daerah dapat ditekan jumlahnya. Yang mana kemiskinan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah.

Ketidaksignifikannya PDRB dalam mempengaruhi kemiskinan juga dapat dilihat berdasarkan data bahwa peningkatan laju PDRB di Jawa Tengah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 tidak selalu diiringi dengan penurunan kemiskinan di Jawa Tengah. Seperti halnya pertumbuhan PDRB di tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 malah terjadi kenaikan kemiskinan.

#### **4.5.1.2 Pendidikan dan Kemiskinan**

Variabel Pendidikan yang diproksi dengan besarnya tingkat melek huruf menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran di Jawa Tengah. Peningkatan angka melek huruf sebagai indikator pendidikan di Jawa Tengah sebesar 1 persen akan menurunkan kemiskinan sebesar 1,267 persen. Yang berarti bahwa peningkatan angka melek huruf akan menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Menurut Simmons (dalam Todaro, 1994), pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dimana digambarkan dengan seorang miskin yang mengharapkan pekerjaan baik serta penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Tetapi pendidikan tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya. Sedangkan orang miskin tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikan hingga ke tingkat yang lebih tinggi

seperti sekolah lanjutan dan universitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap terjadinya peningkatan kemiskinan.

#### **4.5.1.3 Pengangguran dan Kemiskinan**

Dari hasil regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Dimana kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 1 persen tidak menaikkan kemiskinan tetapi dari hasil penelitian ini malah akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,085 persen. Hasil tersebut tidak sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh negatif pengangguran terhadap kemiskinan juga dapat dilihat berdasarkan data pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Jawa Tengah dari tahun 2005 – 2008 yang menunjukkan angka pengangguran terbuka yang terus meningkat, sedangkan data kemiskinan tahun 2005 – 2008 malah mengalami penurunan. Selain itu, bahwa tidak semua orang menganggur itu selalu miskin. Karena seperti halnya penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka ada beberapa macam penganggur, yaitu mereka yang mencari kerja, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang terakhir mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Diantara empat kategori pengangguran terbuka diatas bahwa sebagian diantaranya ada yang masuk dalam sektor informal, dan ada juga yang mempunyai pekerjaan dengan jam kerja kurang dari

35 jam dalam seminggu yaitu hingga berjumlah 4.985.375 jiwa. Dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah yang dikutip dari ([www.waspadalonline.com](http://www.waspadalonline.com)) jumlah pengangguran terbuka Jawa Tengah tahun 2008 mencapai 1,23 juta jiwa. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik peningkatan pengangguran yang terjadi dari tahun. Selain itu jumlah pencari kerja di Jawa Tengah sebanyak 689.415 jiwa, sedangkan lowongan kerja yang ada hanyalah sebanyak 92.357 jiwa. Sehingga sisanya sebanyak 597.058 jiwa tentunya ada yang terserap ke sektor informal dan ada juga yang mencari kerja diluar kota. Selain itu pastinya juga ada yang berusaha atau mempersiapkan usaha sendiri, ada juga yang sedang menunggu mulainya bekerja, ada juga yang mempunyai pekerjaan paruh waktu (*PartTime*) namun dengan penghasilan melebihi orang bekerja secara normal, dan yang mana semua golongan tersebut masuk dalam kategori pengangguran terbuka.

Menurut Godfrey, 1993 (dikutip dalam [www.google.com/artikel](http://www.google.com/artikel) kemiskinan) yaitu bahwa kemiskinan mungkin tidak selalu berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan. Selain itu juga diperkuat dengan pendapat Lincoln Arsyad (1997) yang menyatakan bahwa salah jika beranggapan setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh variabel PDRB, Pendidikan (melek huruf) dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah di tahun 2005 - 2008. Berdasar hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) Jumlah Penduduk, PDRB, Pendidikan, pengangguran dan dummy tahun terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005 - 2008 menunjukkan bahwa besarnya nilai  $R^2$  cukup tinggi yaitu 0,968. Nilai ini berarti bahwa model yang dibentuk cukup baik dimana 96,8 persen variasi variabel dependen kemiskinan dapat dijelaskan dengan baik oleh kelima variabel independen yakni PDRB, Pendidikan, pengangguran. Sedangkan 3,2 persen sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model.
2. Variabel PDRB mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan. Hal ini dikarenakan bahwa peningkatan PDRB yang terjadi di Jawa Tengah tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan di Jawa Tengah, yang mana dapat dilihat dari data PDRB dan data Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2005-2008.

3. Variabel Pendidikan (melek huruf) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan. Yang mana memiliki nilai koefisien  $\beta$  sebesar  $-1,267$  yang artinya, apabila jumlah penduduk melek huruf naik sebesar 1 persen, maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 1,267 persen.
4. Variabel Pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan. Yang mana memiliki nilai koefisien  $\beta$  sebesar  $-0,085$  yang artinya, apabila kenaikan jumlah pengangguran sebesar 1 persen akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,085 persen.
5. Berdasarkan perhitungan dengan uji F diketahui bahwa F-hitung sebesar  $(83,77) > F\text{-tabel}(3,07)$ , sehingga inferensi yang diambil adalah menerima  $H_a$  dan menolak  $H_o$ . Dengan kata lain, hipotesis yang berbunyi “Ada pengaruh antara variabel PDRB, pendidikan (melek huruf) dan pengangguran secara simultan terhadap kemiskinan”, diterima pada kepercayaan 95%.

## 5.2 Keterbatasan

Kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah analisis dan interpretasi dalam penelitian ini adalah data *time series* yang di gunakan masih terlalu pendek. Sehingga mempengaruhi hasil signifikansi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

### 5.3 Saran

1. PDRB memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, sehingga diharapkan bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah seharusnya meningkatkan total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah supaya peningkatan PDRB dapat mempengaruhi kemiskinan secara signifikan.
2. Pendidikan yang tercermin dari besarnya tingkat melek huruf memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga diharapkan pemerintah provinsi Jawa Tengah kembali menggalakkan program pemberantasan buta aksara supaya dapat menekan kemiskinan di seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah..
3. Pengangguran berdasarkan hasil penelitian berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, tetapi dengan hasil tersebut diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih menggerakkan sektor informal. Karena pengangguran dalam penelitian ini menggunakan data pengangguran terbuka, yang mana di dalamnya terdapat golongan masyarakat yang sedang dalam tahap menyiapkan usaha atau mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja yang dimasukkan dalam golongan pengangguran. Sehingga pentingnya peningkatan sektor informal untuk menekan kemiskinan di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Karena sektor informal merupakan salah satu solusi masalah dalam mengatasi pengangguran.

4. Perlunya penggunaan data *time series* yang lebih panjang atau lama untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan yang dilakukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya penekanan angka kemiskinan di Jawa Tengah.
5. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini masih terbatas karena hanya melihat pengaruh variabel PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karenanya diperlukan studi lanjutan yang lebih mendalam dengan data dan metode yang lebih lengkap sehingga dapat melengkapi hasil penelitian yang telah ada dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dalam hal penekanan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2004. *Jawa Tengah Dalam Angka 2004*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Jawa Tengah Dalam Angka 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2004. *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah 2004*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Data dan Informasi Kemiskinan 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah, edisi Agustus 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Damodar Gujarati, 1995, *Ekonometri Dasar Terjemahan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Damodar Gujarati , 2003, *Basic Econometrics Fourth Edition*, Penerbit United States Military Academy, New York.
- Deny Tisna A., 2008, *Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesiatahun 2003-2004*. Kumpulan Skripsi UNDIP: Semarang.
- Dian Octaviani, 2001, *Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia : Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke*, **Media Ekonomi, Hal. 100-118, Vol. 7, No. 8.**
- Didit Purnomo, 2000, *Distribusi Pendapatan di Indonesia : Proses Pemerataan dan Pemiskinan*, **Jurnal Ekonomi Pembangunan, Hal. 47 - 59, Vol. 1, No. 1.**
- Firmansyah. *Modul Praktek Regresi Data Panel dengan Eviews 6*. Semarang : Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi Undip.
- Gaiha, R. 1993. *Design of Poverty Alleviation Strategy in Rural Areas*. Roma: FAO.

- Harlem Siahaan, 1995, *Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi*, **Prisma**, Hal. 17 - 31, No. 1.
- Hermanto S., Dwi W., 2006, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Penduduk Miskin di Indonesia : Proses Pemerataan dan Pemiskinan*, **Direktur Kajian Ekonomi, Institusi Pertanian Bogor**
- Imam Ghozali, 2002, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Irawan dan Suparmoko, 1992, *Ekonomika Pembangunan*, Edisi Kelima, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Lincoln Arsyad, 1997, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, Penerbit BP STIE YKPN, Yogyakarta.
- Marzuki, 2005, *Metodologi Riset*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mudrajad Kuncoro, 2001, *Metode Kuantitatif*, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo, 2003, *Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan*, **Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia**, Hal. 191 - 324, Vol. 51, No. 3
- Prayitno, Hadi. 1986. *Pengantar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Rasidin S., Bonar S., 2009, *Dampak Infestasi Sumberdaya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*, **Prisma**, Hal. 17 - 31, No. 1.
- Sukirno Sadono. 1983. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP Universitas Indonesia.
- Sadono Sukirno, 2000, *Makro Ekonomi Modern*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 1993, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Sumitro Djojohadikusumo, 1995, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Penerbit LP3ES, Jakarta.

Supranto, J. 1997. *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*. Jakarta : Rineka Cipta.

Todaro, Michael P, 1994, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedua, Terjemahan Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Todaro, Michael P, 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Tulus H. Tambunan, 2001, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Usman,dkk., 2009, *Analisis Determinan Kemiskinan sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal*, Fakultas Ekonomi : Intitusi Pertanian Bogor.

Winarno Wahyu., 2007, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews*, UPP STIM YKPN : Yogyakarta.

Kumpulan arti, cara, dan makna kemiskinan : <http://Adi Satria.blog>

[www.google.com/artikel kemiskinan](http://www.google.com/artikel kemiskinan)

[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id).

<http://Wikipedia.com>

[www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

<http://andalas van java online.com>

[www.Bataviase.co.id](http://www.Bataviase.co.id)

[www.waspadalonline.com](http://www.waspadalonline.com)

## REGRESI UTAMA : Lampiran b

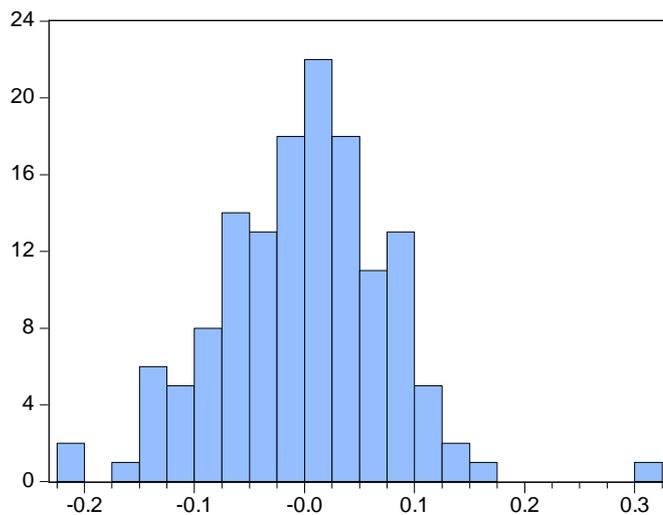
Dependent Variable: LOG(KM)  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 09/23/10 Time: 16:46  
 Sample: 2005 2008  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 35  
 Total panel (balanced) observations: 140

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.867526	2.595132	3.416985	0.0009
LOG(PDRB)	-0.076492	0.054386	-1.406467	0.1626
LOG(MH)	-1.267471	0.573682	-2.209362	0.0294
LOG(PG)	-0.085904	0.042578	-2.017543	0.0463

### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.968141	Mean dependent var	2.886221
Adjusted R-squared	0.956584	S.D. dependent var	0.430811
S.E. of regression	0.089766	Akaike info criterion	-1.757042
Sum squared resid	0.821902	Schwarz criterion	-0.958597
Log likelihood	160.9930	Hannan-Quinn criter.	-1.432578
F-statistic	83.77325	Durbin-Watson stat	1.994656
Prob(F-statistic)	0.000000		



Series: Standardized Residuals  
 Sample 2005 2008  
 Observations 140

Mean 1.09e-17  
 Median 0.005175  
 Maximum 0.306602  
 Minimum -0.208762  
 Std. Dev. 0.076896  
 Skewness 0.099355  
 Kurtosis 4.116141

Jarque-Bera 7.497326  
 Probability 0.023549

## R<sup>2</sup> Auxiliary Regression (Uji Multikolinearitas): Lampiran C

Dependent Variable: PDRB  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 09/23/10 Time: 16:55  
 Sample: 2005 2008  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 35  
 Total panel (balanced) observations: 140

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.725227	1.480661	3.191296	0.0018
MH	-0.006416	0.017179	-0.373475	0.7094
PG	0.040172	0.027959	1.436833	0.1530
R-squared	0.014895	Mean dependent var		4.481500
Adjusted R-squared	0.000514	S.D. dependent var		0.892429
S.E. of regression	0.892200	Akaike info criterion		2.630943
Sum squared resid	109.0549	Schwarz criterion		2.693978
Log likelihood	-181.1660	Hannan-Quinn criter.		2.656558
F-statistic	1.035727	Durbin-Watson stat		0.898356
Prob(F-statistic)	0.357731			

Dependent Variable: MH  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 09/23/10 Time: 16:56  
 Sample: 2005 2008  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 35  
 Total panel (balanced) observations: 140

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	85.80355	2.111272	40.64070	0.0000
PDRB	-0.158527	0.424464	-0.373475	0.7094
PG	0.518599	0.132824	3.904420	0.0001
R-squared	0.100177	Mean dependent var		89.34700
Adjusted R-squared	0.087041	S.D. dependent var		4.641506
S.E. of regression	4.434908	Akaike info criterion		5.838086
Sum squared resid	2694.572	Schwarz criterion		5.901122
Log likelihood	-405.6661	Hannan-Quinn criter.		5.863702
F-statistic	7.626059	Durbin-Watson stat		0.238571
Prob(F-statistic)	0.000724			

Dependent Variable: PG  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 09/23/10 Time: 16:57  
 Sample: 2005 2008  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 35  
 Total panel (balanced) observations: 140

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.70471	4.564084	-2.345423	0.0204
PDRB	0.369551	0.257198	1.436833	0.1530
MH	0.193081	0.049452	3.904420	0.0001
R-squared	0.112633	Mean dependent var		8.202643
Adjusted R-squared	0.099678	S.D. dependent var		2.851934
S.E. of regression	2.706066	Akaike info criterion		4.850065
Sum squared resid	1003.223	Schwarz criterion		4.913100
Log likelihood	-336.5045	Hannan-Quinn criter.		4.875680
F-statistic	8.694629	Durbin-Watson stat		0.854114
Prob(F-statistic)	0.000279			

## UJI PARK

Dependent Variable: LOG(RES2)  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 09/23/10 Time: 16:45  
 Sample: 2005 2008  
 Periods included: 4  
 Cross-sections included: 35  
 Total panel (balanced) observations: 140

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.202917	3.472031	-2.074554	0.0399
PDRB	0.226112	0.193285	1.169840	0.2441
MH	0.030281	0.038884	0.778735	0.4375
PG	0.030390	0.063727	0.476879	0.6342
R-squared	0.019718	Mean dependent var		-3.234838
Adjusted R-squared	-0.001905	S.D. dependent var		2.016538
S.E. of regression	2.018458	Akaike info criterion		4.270700
Sum squared resid	554.0875	Schwarz criterion		4.354747
Log likelihood	-294.9490	Hannan-Quinn criter.		4.304854
F-statistic	0.911886	Durbin-Watson stat		0.664955
Prob(F-statistic)	0.437106			